



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2023

**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Komunikasi dan Informatika**

JANUARI 2024

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat 9, Jakarta, 10110

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namu Buddhaya. Salam Kebajikan.

Mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut, "BPSDM Kominfo") Kementerian Kominfo Tahun 2023 rampung pada waktunya.

LAKIP merupakan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan ini diharapkan akan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan valuasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.¹

Dari sisi peraturan perundang-undangan, LAKIP merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023, BPSDM Kominfo melanjutkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024, Renstra BPSDM Kominfo 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

LAKIP BPSDM Kominfo 2023 diharapkan dapat memberi gambaran tentang capaian BPSDM Kominfo pada tahun 2023 serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan program pengembangan SDM. Sangat kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dalam menggambarkan akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun melalui LAKIP ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik dari masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam mendorong pembangunan bidang komunikasi dan informatika khususnya pengembangan SDM Indonesia serta menggambarkan kinerja dan kinerja tambahan yang kami hasilkan.

¹ Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah





Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung BPSDM Kominfo dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanat. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terjalin dengan baik di waktu-waktu selanjutnya.



No	Jabatan	Paraf
1.	Plt. Sekretaris BPSDM Kominfo	

Jakarta, Januari 2024
**Kepala Badan Pengembangan
SDM Kominfo,**

Dr. Hary Budiarto M.Kom





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Tugas dan Fungsi	10
C. Sumber Daya Manusia BPSDM Kominfo	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Sasaran Program	20
B. Arah Kebijakan BPSDM Kominfo Tahun 2020-2024	22
C. Indikator Kinerja	25
D. Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	35
B. RINCIAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BPSDM KOMINFO TAHUN 2023	38
SP.1 Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	42
IKSP 1.1. Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten	42
IKSP 1.2. Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang Dinyatakan Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional, dan Teknis TIK	54
IKSP 1.3. Persentase (%) Orang yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/Digital yang Lulus Tepat Waktu	57
IKSP 1.4. Persentase (%) Penyelesaian Pembangunan Prasarana Sekolah Tinggi Multi Media	63
IKSP 1.5. Persentase (%) Realisasi Target PNBK Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika	68
SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien	71
IKSP 2.1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Balitbang SDM Tahun 2023	71
IKSP 2.2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1)	76
C. REALISASI ANGGARAN	77
PENUTUP	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo	12
Tabel 1. 2	Wilayah Kerja BPSDMP Kominfo	13
Tabel 2. 1	Indikator Kinerja Program	21
Tabel 2. 2	Cascading Sasaran Strategis dan Target Kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo Kementerian Kominfo Berdasarkan Renstra 2020-2024	22
Tabel 2. 3	Sasaran Pengembangan SDM Era Digital	23
Tabel 3. 1	Capaian BPSDM Kominfo Kementerian Kominfo dalam RPJMN	35
Tabel 3. 2	Capaian BPSDM Kominfo dalam Renstra Kementerian Kominfo	36
Tabel 3. 3	Capaian Renstra BPSDM Kominfo 2020 - 2024	37
Tabel 3. 4	Capaian BPSDM Kominfo dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2020 - 2022	37
Tabel 3. 5	Capaian BPSDM Kominfo Dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023	37
Tabel 3. 6	Capaian BPSDM Kominfo dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun 2023	38
Tabel 3. 7	Capaian BPSDM Kominfo dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun 2020	40
Tabel 3. 8	Capaian BPSDM Kominfo dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun 2021	41
Tabel 3. 9	Capaian BPSDM Kominfo dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun 2022	41
Tabel 3. 10	IKSP 1.1. Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten Program Studi Beasiswa S2 Informatika	42
Tabel 3. 11	IKSP 1.2. Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang Dinyatakan Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional, dan Teknis TIK.....	54
Tabel 3. 12	IKSP 1.3 Persentase (%) Orang yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/Digital yang Lulus Tepat Waktu	57
Tabel 3. 13	Program Studi Beasiswa S2 Informatika	58
Tabel 3. 14	Program Studi Beasiswa S2 Komunikasi	59
Tabel 3. 15	Program Studi Beasiswa S2 Luar Negeri	60
Tabel 3. 16	Target dan Realisasi Kelulusan Penerima Beasiswa S2 Tepat Waktu Tahun 2023	60
Tabel 3. 17	IKSP 1.4. Persentase (%) Penyelesaian Pembangunan Prasarana Sekolah Tinggi Multi Media	63
Tabel 3. 18	IKSP 1.5. Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika	68
Tabel 3. 19	Sumber Pendapatan PNBPN di Lingkungan BPSDM Kominfo	69
Tabel 3. 20	Penerimaan PNBPN di Lingkungan BPSDM Kominfo	69
Tabel 3. 21	Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala	70
Tabel 3. 22	IKSP 2.1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan SDM Tahun 2023	71
Tabel 3. 23	IKSP 2.2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1)	76
Tabel 3. 24	Kinerja Anggaran BPSDM Kominfo Tahun 2020 s.d. Tahun 2023	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPSDM Kominfo (Pusat)	11
Gambar 1.2	Struktur Organisasi UPT BBPSDMP Kominfo	12
Gambar 1.3	Struktur Organisasi UPT BPSDMP Kominfo	13
Gambar 1.4	Struktur Organisasi STMM Yogyakarta	14
Gambar 1.5	Struktur Organisasi UPT BPPTIK	16
Gambar 1.6	Gambaran Sumber Daya Manusia BPSDM Kominfo Tahun 2023	16
Gambar 1.7	Sebaran JFT Per Satker/UPT Tahun 2023	17
Gambar 1.8	Jumlah Pegawai BPSDM tahun 2023	17
Gambar 2.1	Target RPJMN BPSDM Kominfo 2020-2024	19
Gambar 2.2	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	20
Gambar 2.3	Sasaran Strategis dan Target Kinerja BPSDM Kominfo 2020-2024	25
Gambar 2.4	Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023	29
Gambar 2.5	Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023	30
Gambar 3.1	Capaian DTS Tahun 2023	45
Gambar 3.2	Capaian DTS per Satker/UPT	47
Gambar 3.3	Capaian DTS per Akademi	47
Gambar 3.4	Capaian Diklat Aparatur di Pusdiklat TW III tahun 2023	48
Gambar 3.5	Capaian Diklat Aparatur di BPPTIK TW III tahun 2023	49
Gambar 3.6	Capaian Kelulusan Beasiswa S2 Kominfo TW III tahun 2023	49
Gambar 3.7	Capaian Diklat Aparatur di Pusdiklat tahun 2023	55
Gambar 3.8	Capaian Diklat Aparatur di BPPTIK tahun 2023	55
Gambar 3.9	Capaian Kelulusan Beasiswa S2 Kominfo tahun 2023	61

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP BPSDM Kominfo Kementerian Kominfo Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP menyajikan pencapaian kinerja BPSDM Kominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban BPSDM Kominfo dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024, Renstra BPSDM Kominfo 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pada tahun 2023 Badan Pengembangan SDM Kominfo telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Program (SP) dan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Pada TA 2023, pencapaian kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo adalah sebagai berikut:

Dari sisi akuntabilitas keuangan, alokasi anggaran BPSDM Kominfo pada awal tahun 2023 sebesar Rp 582.083.045.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Porsi pagu penggunaan PNBP tahun 2023 sebesar 19,2%. Realisasi anggaran pada Triwulan IV mencapai Rp 553,708,290,840 (96,08%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 22,575,054,160. Kondisi lebih detail mengenai capaian kinerja tersebut akan ditampilkan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

1 Dari 7 (tujuh) IKSP yang telah ditetapkan, sebanyak 5 (lima) IKSP atau sekitar 71,43% IKSP yang pencapaiannya melebihi target (>100%).

2 IKSP yang pencapaiannya melebihi target dari yang ditetapkan (>100%) adalah :

1. Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten;
2. Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang Dinyatakan Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis TIK;
3. Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan SDM Tahun 2023;
5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1).

Dalam rangka terus mendorong terwujudnya kinerja yang optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan, BPSDM Kominfo berusaha mengatasi dan mencari solusi atas kendala dan hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, BPSDM Kominfo juga telah menerapkan Manajemen Risiko, monitoring berkala Manajemen Risiko dalam rangka identifikasi risiko serta melakukan mitigasi risiko serta tindak lanjutnya.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholder BPSDM Kominfo dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan kinerja BPSDM Kominfo.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB I

PENDAHULUAN



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

A. Latar Belakang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut sebagai, "Kementerian Kominfo") merupakan institusi pemerintah yang diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada pelaksanaannya sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Kominfo menyelenggarakan program dan kegiatan terkait dengan satuan kerja yang dinaunginya. Dalam menjalankan tugas di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut sebagai, "BLSDM") sebagai salah satu unit kerja eselon I menjalankan fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.⁴

Namun, dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengatur bahwa BRIN berperan membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi (Pasal 3). Kemudian, sesuai amanat Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.⁵

Maka, tugas dan fungsi penelitian di BPSDM Kominfo telah beralih ke BRIN setelah peraturan tersebut diundangkan. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini proses revisi SOTK Kementerian Kominfo tengah disusun.

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, BLSDM telah berubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut, "BPSDM Kominfo"). Tugas BPSDM Kominfo adalah menyelenggarakan pengembangan SDM di bidang komunikasi, informatika dan digital. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPSDM Kominfo menyelenggarakan fungsi:

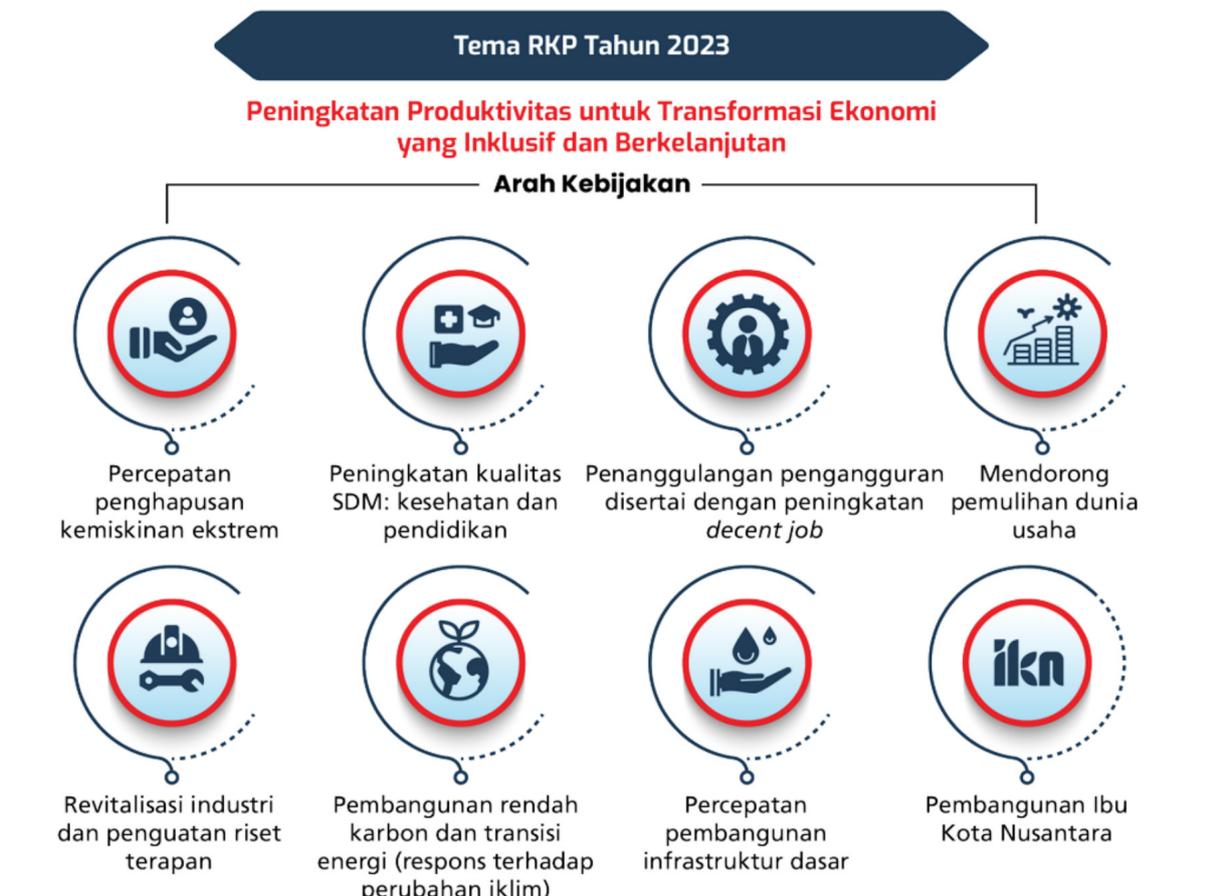
- a** perumusan kebijakan teknis pengembangan SDM bidang komunikasi, informatika dan digital.
- b** Pelaksanaan pengembangan SDM bidang komunikasi, informatika dan digital.
- c** Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan SDM di bidang komunikasi, informatika dan digital.
- d** Pelaksanaan administrasi BPSDM Kominfo.
- e** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96.

⁵ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2021

Presiden Joko Widodo menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bahwa bagian dari rencana penggunaan anggaran tahun 2023 meliputi peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Anggaran tersebut diplot pada anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun. Presiden Jokowi mengamanatkan bahwa kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Selain itu, kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa.⁶

Dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"



⁶ https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sampaikan_lima_fokus_rapbn_2023

Strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan adalah sebagai berikut:⁷

	<p>Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Sistem Jaminan Sosial • Percepatan Modernisasi Pertanian • Peningkatan Pemerataan Pembangunan 		<p>Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dilaksanakan melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri • Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan
	<p>Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan dilaksanakan melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Sistem Kesehatan Nasional • Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter) 		<p>Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respons Terhadap Perubahan Iklim) dilaksanakan melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah Karbon • Percepatan Transisi Energi dengan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan
	<p>Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan Decent Job dilaksanakan melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha 		<p>Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi • Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital • Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas
	<p>Mendorong Pemulihan Dunia Usaha dilaksanakan melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Revitalisasi Pariwisata • Memperkuat Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional 		<p>Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar di Ibu Kota Nusantara

Berkorelasi langsung dengan isu di atas, BPSDM Kominfo berusaha memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia dengan mengusung program prioritas *Digital Talent Scholarship* (selanjutnya disebut sebagai, "DTS"). Berangkat dari hasil penelitian Bank Dunia dan McKinsey, dalam kurun waktu tahun 2015–2030, kebutuhan talenta digital Indonesia mencapai 9 juta orang dengan kebutuhan rata-rata 600.000 orang per tahun.⁸ DTS telah dimulai sejak tahun 2018 dan resmi menjadi bagian dari target RPJMN dan Renstra baik pada level Kementerian Kominfo dan BPSDM Kominfo tahun 2020–2024. Tujuan utama program ini adalah mengurangi kesenjangan kemampuan digital di Indonesia baik dari Indonesia bagian Barat sampai dengan bagian Timur.

Pada dokumen perencanaan dan penganggaran Rincian Prioritas Nasional Kementerian/Lembaga Tahun 2023 Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8.PP.04.04/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pagu Indikatif Belanja

⁷ Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Kementerian PPN/BAPPENAS.

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dit%20Evaluasi%2C%20dan%20Pengendalian%20Penyusunan%20Perencanaan%20Pembangunan/Ringkasan%20RKP%202023.pdf

⁸ <https://baliitbangsdm.kominfo.go.id/berita-kepala-baru-semangat-baru-19-712>

Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, DTS termasuk ke dalam, DTS termasuk ke dalam 2 KRO yakni:

1 KRO: 059.GB.4153 SDM Vokasi Bidang Kominfo (RO: 059.GB.4153.SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika)

Major Project	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
26-Transformasi Digital	02-Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK	03-Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	05-Transformasi Digital	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	03-Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
	03-Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	03-Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	01-Konsolidasi Demokrasi	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

2 KRO: 059.GB.4495 Pengembangan Kompetensi Digital bagi Masyarakat (RO: 059.GB.4495.SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika).

Major Project	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
26-Transformasi Digital	02-Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK	03-Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	05-Transformasi Digital	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kerja Sama Industri	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	03-Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
03-Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	03-Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	01-Konsolidasi Demokrasi	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam hal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, Presiden menekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T), penguatan *link and match* dengan pasar kerja, pemerataan kualitas Pendidikan dan penguatan kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

Dasar-dasar Kebijakan RPJMN IV (2020-2024)



Sasaran RPJMN IV (2020-2024):

Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah yang didukung oleh **SDM berkualitas dan berdaya saing**



Pidato Pelantikan Presiden-Wakil Presiden RI 2019-2024, 20 Oktober 2019





Sumber: Lamp. 1 - Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024

Dasar-dasar Kebijakan RPJMN IV (2020-2024)⁹

⁹ Sandjaja Sarwohadi, *Arah Pembangunan Bidang Aparatur Negara dalam RPJMN 2020-2024 dan Rancangan Awal RKP 2023*, disampaikan pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, https://bkd.jatengprov.go.id/assets/download/Arah_Pembangunan_Bid._Aparatur_Negara_dan_Ranwal_RKP_2023_final_-_BKD_Jateng.pdf

Saat ini Indonesia sudah memasuki era digital, era industri 4.0, dan memasuki masyarakat digital 5.0. Maka dari itu, talenta digital sangat diperlukan. Tidak lagi melakukan digitasi atau digitalisasi, tetapi melakukan transformasi digital. Transformasi digital bertujuan untuk mengubah pola pikir konvensional menjadi pola pikir berbasis teknologi digital. Transformasi digital menuntut suatu kompetensi yang lebih dari biasanya. Siapa yang tidak mengikuti maka akan mengalami *disruption*, itu adalah karakteristik dari transformasi digital. Dengan begitu, mau tidak mau harus mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi digital.¹⁰

Indonesia perlu menyelaraskan pasokan keterampilan dengan permintaan industri yang terus berkembang dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar serta wilayah Indonesia bagian Barat namun juga melebarkan manfaat program ini ke wilayah Timur dan daerah 3T. Selain itu, kolaborasi sinergis antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, juga perlu dijalin lebih erat untuk menjembatani antara kebutuhan dan permintaan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara simultan telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) bidang digital yang unggul dan berdaya saing, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Melalui pendidikan non-formal, berupa pelatihan pada tiga level keterampilan digital yakni *Basic Digital Skill*, *Intermediate Digital Skill* dan *Advanced Digital Skill*.

Dalam *Basic Digital Skill*, pemerintah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk memberikan pelatihan literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Sementara pada tingkatan *Intermediate Digital Skill*, Kominfo menyiapkan program *Digital Talent Scholarship (DTS)*. Bidang yang bisa dipelajari mulai dari keamanan siber, kecerdasan buatan, *big data*, komputasi awan, *coding*, *augmented reality (AR)*, dan *virtual reality (VR)*. Sedangkan pada *Advanced Digital Skill*, Kominfo memberikan pelatihan digital tingkat lanjutan melalui *Digital Leadership Academy (DLA)* bagi pimpinan lembaga publik maupun swasta. Selain itu, Kominfo juga menyiapkan program beasiswa pendidikan formal pada jenjang Program Master (S2) di bidang Teknologi Informasi yang tahun ini terbuka bagi 300 putra-putri terbaik bangsa. Program ini terbuka untuk masyarakat umum yang bekerja di sektor TIK, aparaturnya Pemerintah Pusat dan Daerah, serta TNI dan POLRI, yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik dalam maupun luar negeri.¹¹

¹⁰

<https://kilaskementerian.kompas.com/kemenkominfo/read/2023/12/22/10233171/lewat-digi-ers-day-kemenkominfo-hadirkan-terobosan-peningkatan-kompetensi>

¹¹<https://www.antaraneews.com/berita/2887373/pemerintah-siapkan-sdm-digital-yang-unggul-dan-berdaya-saing>

Apabila diuraikan, berikut 3 level pelatihan keterampilan TIK yang dilaksanakan Kementerian Kominfo dan unit kerja pelaksananya:



1

Basic Digital Skill

Pelatihan literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) dilaksanakan Ditjen Aplikasi Informatika.



2

Intermediate Digital Skill

Digital Talent Scholarship (DTS) dilaksanakan BPSDM Kominfo.



3

Advanced Digital Skill

Digital Leadership Academy (DLA) dilaksanakan BPSDM Kominfo.

Selain DTS dan DLA, BPSDM Kominfo juga melaksanakan peningkatan kompetensi SDM digital dasar melalui kegiatan Pengenalan TIK bagi wanita, anak-anak, disabilitas dan masyarakat umum. Yang membedakan Pengenalan TIK yang dilaksanakan BPSDM Kominfo dengan GNLD Ditjen Aptika adalah Pengenalan TIK yang dilaksanakan BPSDM Kominfo dilaksanakan dengan skema *facility-based* dengan memanfaatkan perangkat TIK yang dimiliki 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPSDM Kominfo.

Untuk menunjang program pengembangan SDM yang gencar dikerjakan BPSDM Kominfo, pada tahun 2022 lalu kami melaksanakan pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang dilakukan pada 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital pada kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. IMDI dapat dijadikan acuan dalam perencanaan program pengembangan SDM Digital di Indonesia. IMDI terdiri atas 4 pilar, yakni: Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif dan terstandarisasi.

Pada skala nasional, diperoleh hasil IMDI sebesar 37,8 dari skala 1-100 dengan rincian nilai per pilar meliputi 40,24 untuk infrastruktur dan ekosistem, 49,35 untuk Keterampilan Digital, 22,06 untuk Pemberdayaan, dan 40,35 untuk Pekerjaan. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa masih diperlukan perbaikan di berbagai aspek terkait masyarakat digital khususnya pada aspek Pemberdayaan. Hasil pengukuran indeks ini tidak ditujukan untuk membandingkan daya saing masyarakat digital antar daerah, melainkan dapat

dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan fokus target berdasarkan indikator-indikator di setiap pilar, mendorong koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan di level Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Indonesia untuk merencanakan dan menetapkan program prioritas pembangunan SDM digital di wilayah masing-masing.¹³

Oleh karena itu, sesuai amanat RPJMN dan Renstra 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja 2023, program prioritas terkait pengembangan SDM dengan agenda utama pemerataan skor IMDI masih perlu dilanjutkan demi memanfaatkan bonus demografi Indonesia untuk menyambut lapangan kerja digital yang akan *booming* beberapa tahun ke depan.

¹² Executive Summary Indeks Masyarakat Digital (IMDI)



B. Tugas dan Fungsi

Tugas BPSDM Kominfo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021¹³ menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika. **Dalam melaksanakan tugas tersebut BPSDM Kominfo menyelenggarakan fungsi :**

- 01** Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- 02** Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- 03** Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- 04** Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo; dan
- 05** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

¹³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120.

Sampai saat ini, Permenkominfo tersebut masih digunakan karena Permenkominfo terkait SOTK baru sedang dalam proses penyusunan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini yang memisahkan fungsi penelitian dari *core business* BPSDM Kominfo.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPSDM Kominfo

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPSDM Kominfo juga didukung oleh UPT di daerah yang ditetapkan dalam beberapa Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:

- 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.¹⁴

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo) Medan dan Makassar yang dipimpin oleh Kepala BBPSDMP Kominfo, memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan.

¹⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 444.

Dalam melaksanakan tugasnya, BBPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:

- a** Penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran;
- b** Penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
- c** Penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika
- d** penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
- e** Penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian bidang komunikasi dan informatika; dan
- f** Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

Susunan organisasi BBPSDMP Kominfo terdiri dari: Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

NO	NAMA UPT	WILAYAH KERJA
1	BBPSDMP Kominfo Medan	1.Aceh 2.Sumatera Utara 3.Sumatera Barat 4.Riau 5.Kepulauan Riau 6.Kalimantan Barat 7.Kalimantan Utara
2	BBPSDMP Kominfo Makassar	1.Sulawesi Selatan 2.Sulawesi Tenggara 3.Nusa Tenggara Timur 4.Maluku 5.Maluku Utara 6.Papua 7.Papua Barat

Tabel 1. 1 Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo



Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT BBPSDMP Kominfo

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) dipimpin Kepala BPSDMP Kominfo. memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:

- a** Pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran;
- b** Penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
- c** Penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
- d** Penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
- e** Penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; dan
- f** Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

Susunan organisasi BPSDMP Kominfo terdiri dari: Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

NO	NAMA UPT	WILAYAH KERJA
1	BPSDMP Kominfo Jakarta	1.DKI Jakarta 2.Sumatera Selatan 3.Bangka Belitung 4.Jambi
2	BPSDMP Kominfo Bandung	1.Jawa Barat 2.Lampung 3.Banten 4.Bengkulu
3	BPSDMP Kominfo Yogyakarta	1.Daerah Istimewa Yogyakarta 2.Jawa Tengah 3.Bali
4	BPSDMP Kominfo Surabaya	1.Jawa Timur 2.Nusa Tenggara Barat
5	BPSDMP Kominfo Banjarmasin	1.Kalimantan Selatan 2.Kalimantan Tengah 3.Kalimantan Timur
6	BPSDMP Kominfo Manado	1.Sulawesi Utara 2.Sulawesi Tengah 3.Gorontalo 4.Sulawesi Barat

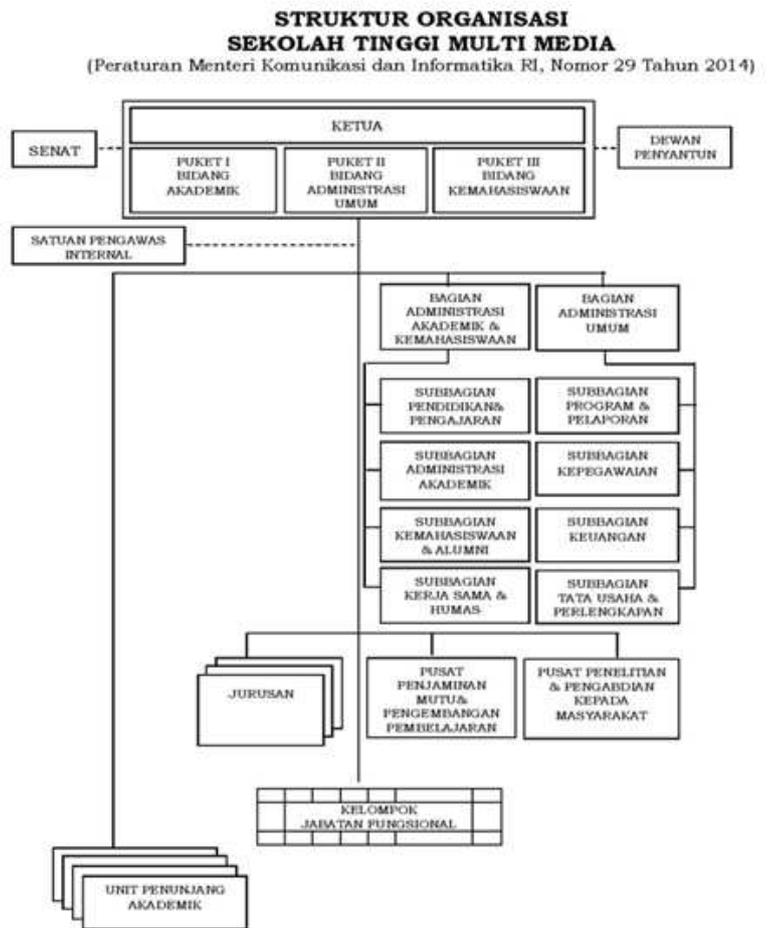
Tabel 1. 2 Wilayah Kerja BPSDMP Kominfo



Gambar 1.3 Struktur Organisasi UPT BPSDMP Kominfo

2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian STMM, dalam melaksanakan Perpres Kemenkominfo menerbitkan Permenkominfo nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja STMM yang dipimpin oleh Ketua STMM (setingkat Eselon II) dan memiliki tugas menyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan infomatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi STMM terdiri dari: Ketua, Pembantu Ketua, Senat, Dewan Penyantun, Satuan Pengawas Intenal, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Bagian Administrasi Umum, Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Unit Penunjang Akademik dan Kelompok Jabatan fungsional.



Gambar 1.4 Struktur Organisasi STMM Yogyakarta

¹⁵ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278.

3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.¹⁶

Sebagai salah satu UPT di lingkungan BPSDM Kominfo yang dipimpin oleh Kepala BPPTIK, memiliki tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi program pelatihan instansi pemerintah, serta pelayanan produk jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

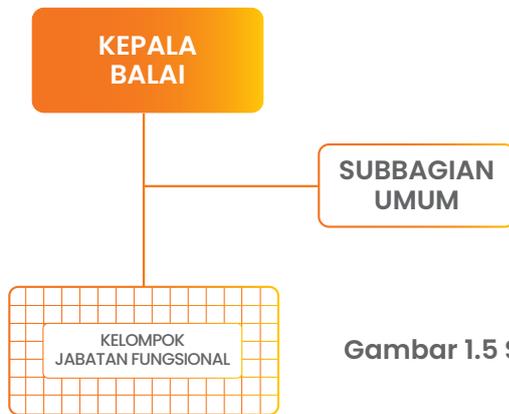
BBPTIK juga memiliki tugas melaksanakan pelatihan (*vocational training*), uji kompetensi dan sertifikasi serta pelayanan produk jasa di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN Nomor 2668/M.PAN/8/2009, tanggal 26 Agustus 2009 dan menyelenggarakan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 489/K.1/PDP.10.4 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Badan Pengembangan SDM Kominfo Kementerian Kominfo sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis Bidang TIK.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPTIK menyelenggarakan fungsi:

- a** Penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, pemasaran, pengolahan data dan informasi, evaluasi, pengawasan dan penjaminan mutu serta pelaporan di bidang pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi program pelatihan pemerintah, serta pelayanan produk jasa teknologi informasi dan komunikasi;
- b** Penyiapan pelaksanaan pelayanan produk jasa bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- c** Penyiapan penyusunan dan pengembangan bahan kurikulum, standar, sistem, metode, perencanaan tenaga pengajar dan asesor, pelaksanaan pelatihan kerja, serta uji kompetensi dan sertifikasi masyarakat bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- d** Penyiapan penyusunan dan pengembangan bahan kurikulum, standar, sistem, metode, perencanaan tenaga pengajar dan asesor, Pelaksanaan pelatihan teknis, uji kompetensi dan sertifikasi aparatur, serta akreditasi lembaga pelatihan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e** Pelaksanaan urusan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

¹⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 445.

Susunan organisasi BPPTIK terdiri dari: Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.5 Struktur Organisasi UPT BPPTIK

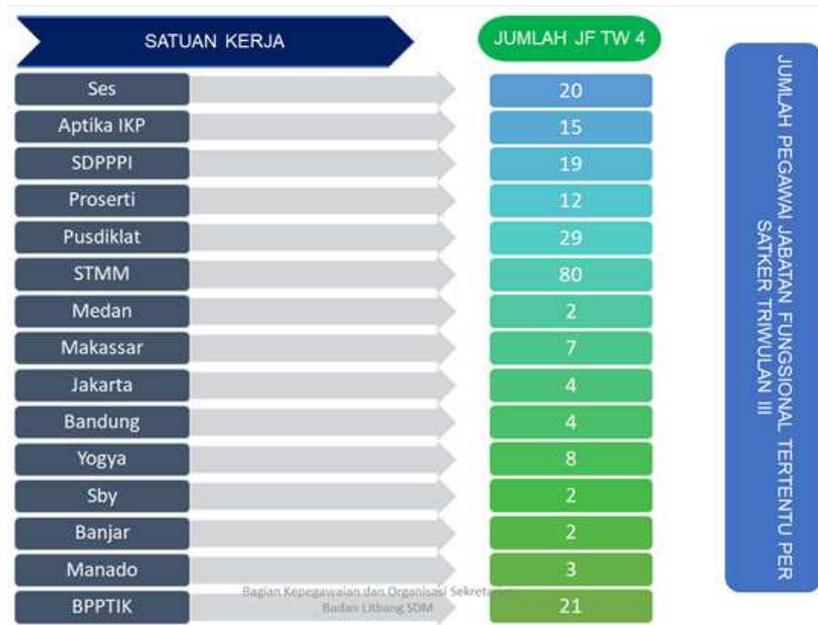
C. Sumber Daya Manusia BPSDM Kominfo

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPSDM Kominfo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung 705 orang pegawai dengan rincian 488 orang tercatat sebagai PNS, CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 204 orang dan 13 orang Tenaga Ahli dan Pendukung dari 15 (lima belas) Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis.

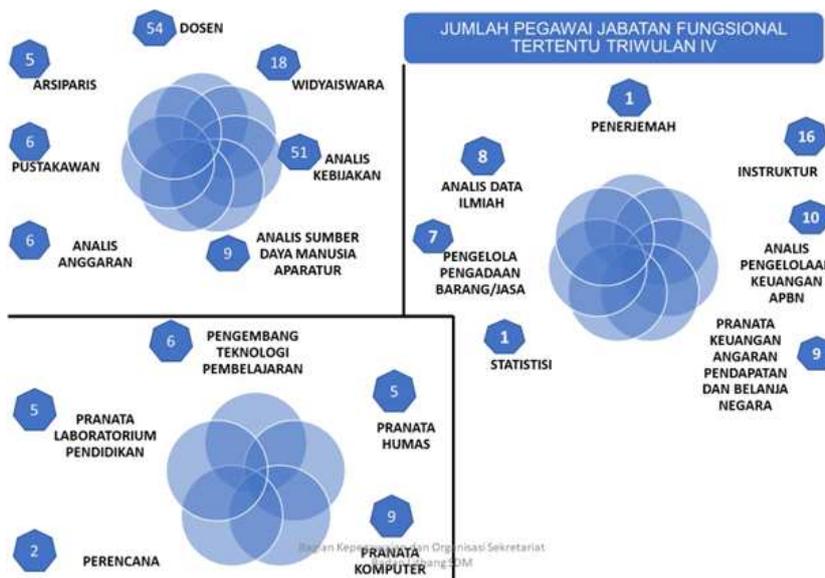
Rincian pengelompokan pangkat jabatan terdiri dari 8 orang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), 3 orang Jabatan Administrator (JA), 266 orang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), 6 Jabatan Pengawas (JP), dan 243 Jabatan Pelaksana (JPL).



Gambar 1. 6 Gambaran Sumber Daya Manusia BPSDM Kominfo Tahun 2023



Gambar 1. 7 Sebaran JFT Per Satker/UPT Tahun 2023



Gambar 1. 8 Jumlah Pegawai BPSDM tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan SDM Kominfo Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024 merupakan perencanaan jangka menengah Badan Pengembangan SDM Kominfo yang mengacu pada RPJM Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2024.

Berdasarkan Matriks Pembangunan RPJMN 2020–2024 pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024¹⁷, target BPSDM Kominfo masuk pada 3 ProP (Proyek Prioritas) yakni Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Peningkatan Literasi TIK Masyarakat, dan Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika dengan rincian sebagai berikut:

Proyek Prioritas	Indikator	2020	2023	2023	2023	2024
ProP: Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Profesional	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang memperoleh Pelatihan dan Sertifikasi (termasuk Lokus Kawasan Prioritas)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Penerima Beasiswa S2/S3 yang lulus tepat waktu	90	90	90	95	95
ProP: Peningkatan Literasi TIK Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pengenalan TIK	2.000	2.200	2.500	3.000	3.500
Pengenalan TIK kepada Masyarakat	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (termasuk lokus kawasan prioritas)	2.000	2.200	2.500	3.000	3.500
ProP: Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	1 kajian				
Kajian Strategis Penerapan Sistem Big Data Pemerintah	Jumlah Kajian Strategis Penerapan Big Data Pemerintah	1 kajian				

Gambar 2.1 Target RPJMN BPSDM Kominfo 2020–2024

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, BPSDM Kominfo mengambil peran penting pada 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yakni sebagai berikut:

SS.06		Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.07	Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK	100	100	100	100	100
SS.07		Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital				
IKSS.02	Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital	45.520	72.500	72.500	72.500	72.500

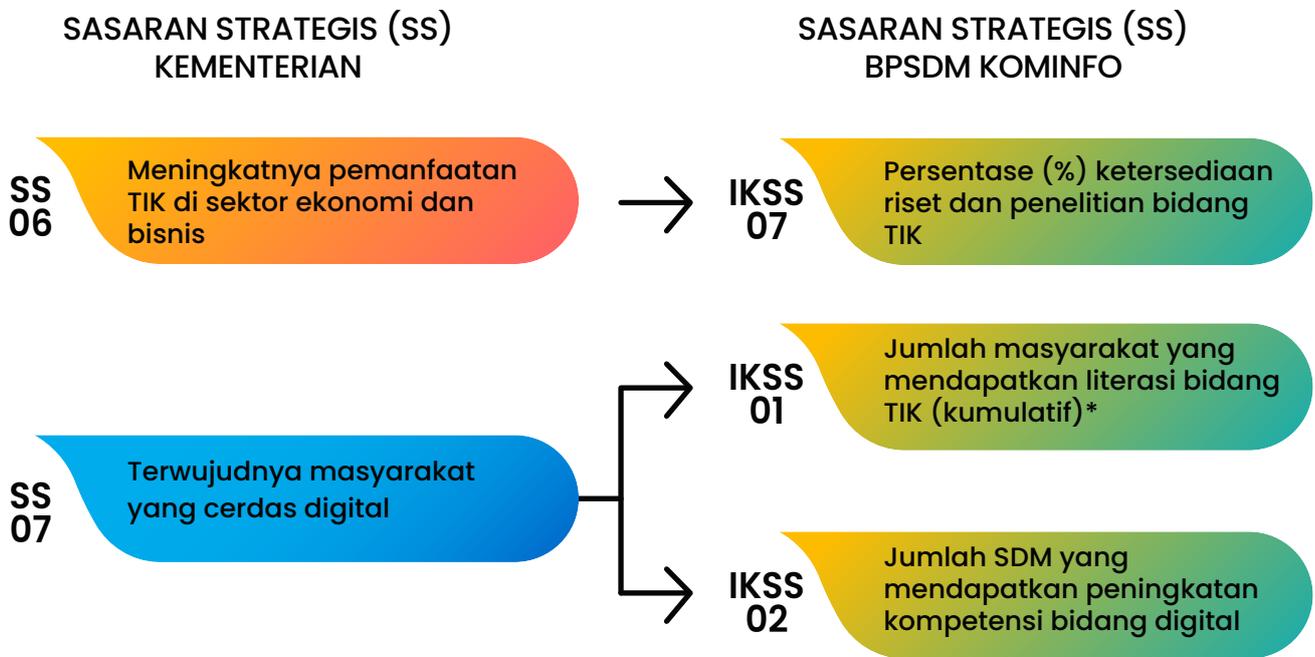
Gambar 2. 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

A. Sasaran Program

Dalam mendukung 3 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas, BPSDM Kominfo menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)						
SP.05	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan SDM Nasional bidang TIK					
IKP.01	Jumlah peserta pelatihan digital skill* a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas) b. SKKNI	45.000	60.000	60.000	60.000	75.000
IKP.02	Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu	90	90	90	95	95
IKP.03	Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TIK, fungsional dan manajerial (kumulatif)	400	3.400	5.400	7.500	10.000
IKP.04	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK* (kumulatif)	2.000	4.400	10.800	15.200	19.600
SP.06	Meningkatnya kualitas riset dan penelitian bidang TIK					
IKP.01	Persentase (%) peningkatan jumlah sitasi jurnal ilmiah terbitan Balitbang	5	5	5	5	5
IKP.02	Persentase (%) hasil riset dan penelitian yang mendukung kebijakan dan pengembangan bidang TIK	100	100	100	100	100
Program Dukungan Manajemen						
SP.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BLSDM yang Bersih dan Efisien					
IKP.01	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BLSDM	76,5	78	80	82	84
IKP.02	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BLSDM	67	68,5	70,5	72,5	75
IKP.03	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK BLSDM Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK	1	1	1	1	1
IKP.04	Nilai Kinerja Anggaran BLSDM	86	86	87	87	88

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Program



Tabel 2.2 Cascading Sasaran Strategis dan Target Kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo Kementerian Kominfo Berdasarkan Renstra 2020 – 2024

B. Arah Kebijakan BPSDM Kominfo Tahun 2020–2024

Sesuai dengan salah satu arahan presiden dan agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, peningkatan kompetensi bidang TIK/digital menjadi sangat relevan, terlebih di dorong oleh agenda pembangunan nasional untuk pengembangan ekonomi digital, dan revolusi industri 4.0 serta penyelenggaraan *e-government*. Di samping itu, arah pembangunan nasional juga menekankan peningkatan literasi digital masyarakat untuk mendukung perkembangan dan pemanfaatan TIK. Walaupun pengembangan SDM dan edukasi bukan merupakan tanggung jawab utama Kemkominfo, peran Kemkominfo dalam memfasilitasi dan mengakselerasi peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM menjadi sangat penting terutama dalam mendukung transformasi digital untuk pengembangan ekonomi digital pada sektor fokus yang tertuang di dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.



Tabel 2.3 Sasaran Pengembangan SDM Era Digital

Arah kebijakan terkait pengembangan SDM bidang TIK/digital dititikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Peningkatan produktivitas dan daya saing untuk mendukung penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi melalui pengembangan kompetensi untuk angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda termasuk yang ada di kawasan prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi terutama ekonomi digital pada sektor fokus serta peningkatan kapasitas SDM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
- 2 Penguatan kelembagaan termasuk pengembangan kompetensi ASN, pembentukan ekosistem, dan standar kompetensi jabatan ASN khususnya dalam bidang TIK/digital serta manajemen talentanya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-government* yang dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

- 3 Alih kompetensi melalui *reskilling*, *upskilling* dan *newskilling* khususnya bagi tenaga kerja bidang TIK/digital yang terdampak automasi sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja.
- 4 Mengurangi pengangguran bidang kominfo melalui peningkatan kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak serta peran industri/swasta dalam pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi SDM untuk sektor unggulan dan dapat menyediakan pelatihan berlandaskan standar kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang TIK/digital dan literasi digital yang akan terfokus pada segmen prioritas, strategi yang akan dijalankan meliputi:



1 Peningkatan kompetensi dan kemampuan digital untuk tenaga kerja Penguatan peran Kemkominfo sebagai fasilitator dan akselerator pengembangan kompetensi SDM bidang TIK/digital.

- a Peningkatan kualitas SKKNI bidang TIK/Digital yang "*future-proof*" melalui kolaborasi intensif dengan pelaku industri dalam pembaharuan SKKNI, serta penyusunan peta okupasi umum dan *industry-specific*
- b Peningkatan kompetensi dan kemampuan tenaga kerja bidang TIK/Digital dengan memanfaatkan program *Digital Talent Scholarship* untuk 300.000 peserta pelatihan.

- c Pemberian beasiswa S2/S3 bidang digital kepada 1.000 penerima
- d Pengenalan TIK bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan dasar penggunaan dan pemanfaatan TIK.
- e Peningkatan kapabilitas dan kapasitas lembaga pelatihan dan sertifikasi bidang TIK/Digital.

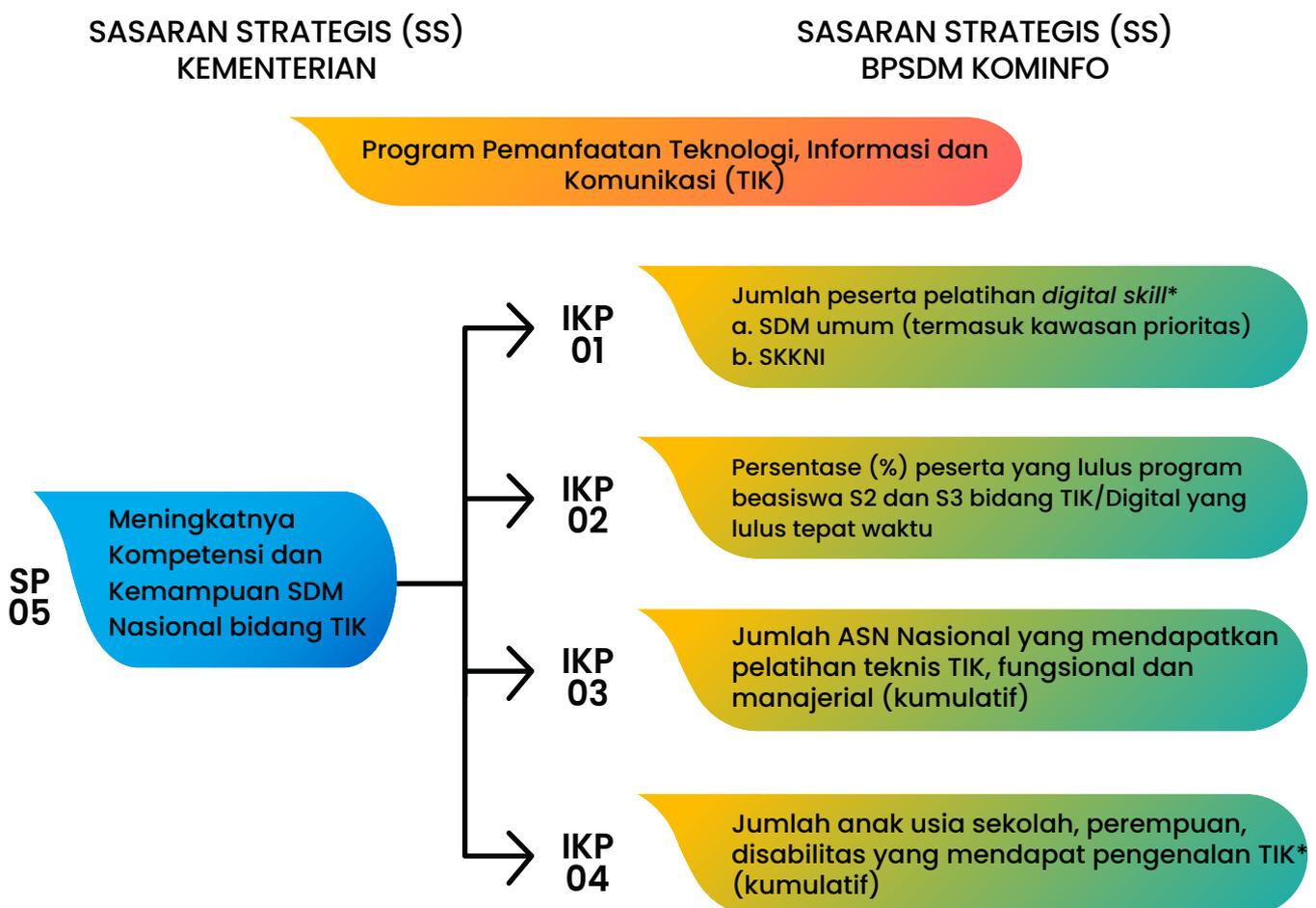
2 Peningkatan Kompetensi dan kemampuan ASN dan Umum Bidang Komunikasi dan Informatika.

3 Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang Kominfo

- a Peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang Kominfo melalui Sekolah Tinggi Multi Media;
- b Peningkatan fasilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan
- c Peningkatan sumber daya penyelenggaraan pendidikan tinggi.

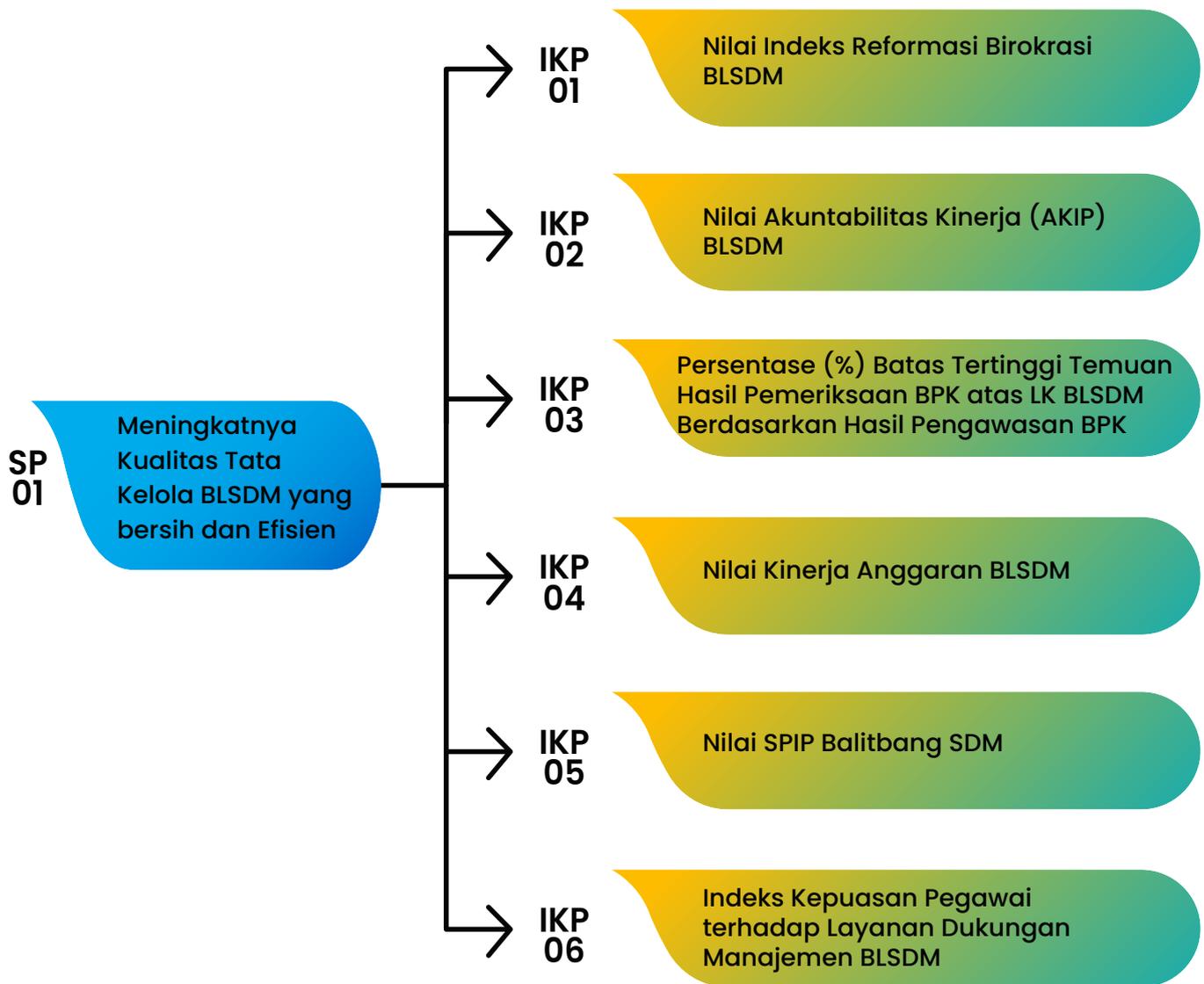
C. Indikator Kinerja

Berdasarkan Sasaran Program tersebut, dirumuskan indikator kinerja utama seperti di bawah ini:



Gambar 2.3 Sasaran Strategis dan Target Kinerja BPSDM Kominfo 2020 - 2024

Program Dukungan Manajemen



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

D. Perjanjian Kinerja

Untuk menjalankan Rencana Strategis, Kementerian menyusun Perjanjian Kinerja yang bersifat tahunan untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis 5 Tahunan. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Dari Renstra Kementerian, dilakukan cascading menjadi Perjanjian Kinerja BPSDM Kominfo. Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, secara rinci adalah sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong," dengan ini kami menetapkan Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2023.

Jakarta, Agustus 2023
Menteri Komunikasi dan Informatika,

Budi Arie Setiadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau	1. Persentase (%) Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan Mobile Broadband 4G (Eksisting dari Tahun 2015 s.d. Tahun 2022: 5.410 Desa/Kelurahan)	100% (6.915 Desa/Kelurahan) Target Pembangunan Lokasi Baru Tahun 2023: 332 Desa/Kelurahan
		2. Persentase (%) Penyediaan Bandwidth Internet kepada Layanan Publik melalui Satelit Multifungsi SATRIA-1	33% (50 Gbps dari 150 Gbps)
2.	Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK	Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband (Eksisting dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2022: 30 MHz)	320 MHz Target Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband Tahun 2023: 290 MHz yang diperoleh dari pita frekuensi 700 MHz, 3,3 GHz dan 3,5 GHz
3.	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital (Eksisting: 76,44% atau 199.624.863 Penduduk Indonesia yang Terjangkau Penyiaran Televisi Digital Terhadap Total Jumlah Penduduk Indonesia sebesar 261.142.385)	80% (208.921.531 Penduduk dari total 261.142.385 Penduduk Indonesia) Target Penambahan Penduduk Indonesia yang Terjangkau Penyiaran Televisi Digital Tahun 2023: 3,56% atau 9.295.668
4.	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	1. Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2023 (Eksisting Tahun 2022: 3,54)	3,6 (Dari skala 1-5)
		2. Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten (Eksisting Tahun 2022: 79,33% atau 192.659 Peserta Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan Digital Skill sebanyak 242.862 Peserta)	70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Eksisting Tahun 2022: 79,45%)	≥ 79%
6.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2023 (Eksisting Tahun 2022 berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN & RB: 79,01)	79,03
		Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	3
7.	Tercapainya Target PNBK Kementerian Kominfo	Persentase (%) Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo (Eksisting Tahun 2022: 108,68% atau Rp. 26.904.005.390.536,-)	100% (Rp. 25.076.594.896.000,-)

5

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Program	Anggaran
1. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Rp. 2.577.850.564.000,-
2. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik	Rp. 1.122.406.944.000,-
3. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Rp. 13.981.917.281.000,-
4. Program Komunikasi Publik	Rp. 293.203.110.000,-
5. Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.727.813.538.000,-
Total Anggaran	Rp. 19.703.190.437.000,-

Jakarta, Agustus 2023
Menteri Komunikasi dan Informatika



Budi Arie Setiadi

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023

Apabila diturunkan dari Perjanjian Kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika, maka BPSDM Kominfo mendukung Sasaran Strategis 4 yang berbunyi, “*Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK*” dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2., “*Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten (Eksisting Tahun 2022: 79,33% atau 192.659 Peserta Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan Digital Skill sebanyak 242.862 Peserta)*” dengan target 70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta).

Untuk memenuhi target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Menteri Kominfo, maka disusunlah target Indikator Sasaran Program (IKSP) BPSDM Kominfo sesuai target Menteri yang terdiri atas IKSP 1.1 dengan nomenklatur dan target yang sama. Berangkat dari Perjanjian Kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika, disusunlah Perjanjian Kinerja BPSDM

Kominfo Tahun 2023 yang merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji kinerja BPSDM Kominfo yang jelas dan terukur selama tahun 2023 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja BPSDM Kominfo Tahun 2023 merupakan implementasi dari Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Kementerian. Tujuan perjanjian kinerja ini adalah untuk menjadi tolak ukur kinerja BPSDM Kominfo sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar pemberian reward atau penghargaan serta sanksi atau *punishment*.

Perjanjian Kinerja BPSDM Kominfo Tahun 2023 yang ditandatangani pada bulan Agustus 2023 oleh Menteri Kominfo dan Kepala BPSDM Kominfo memiliki 2 (dua) Sasaran Program dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Program yang dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja ini.
2. Bersedia dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini secara akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
5. Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	1. Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten (Eksisting Tahun 2022: 79,33% atau 192.659 Peserta Tersertifikasi dan Total Peserta Pelatihan Digital Skill sebanyak 242.862 Peserta)	70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)
		2. Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang Dinyatakan Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional, dan Teknis TIK (Eksisting 2020 s.d. 2022: 4.844 peserta)	90% (2.502 dari Total Target 2.780 ASN)
		3. Persentase (%) Orang yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK Digital yang Lulus Tepat Waktu (Eksisting Tahun 2022: 63,44% atau 85 peserta lulus dari 134 peserta)	90% (147 dan 165 orang)
		4. Persentase (%) Penyelesaian Pembangunan Prasarana Sekolah Tinggi Multi Media	50% 1. Tersedianya Detail Engineering Design (10%) 2. Lelang Manajemen Konstruksi (10%) 3. Pekerjaan Konstruksi (30%)
		5. Persentase (%) Realisasi Target PNPB Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika	100% (Rp. 20.309.000.000,-)
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPSPDM Kominfo Tahun 2023 (Eksisting 2022 berdasarkan penilaian dari APIP: 90,26)	79,03
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Ponggawa Anggaran Eselon I (UAPPA E1)	80

Program	Anggaran
1. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Rp. 376.793.152.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 199.490.193.000,-
Total Anggaran	Rp. 576.283.345.000,-

Pejabat Penilai
Menteri Komunikasi dan Informatika,



Budi Arie Setiadi

Jakarta, Agustus 2023
Pejabat yang Dinilai
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Komunikasi
dan Informatika,



Hary Budiarto

Gambar 2. 5 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**

Untuk mencapai target kinerja BPSDM Kominfo tahun 2023, rencana kerja dilakukan melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut:

1. **Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten.**

Pembangunan ekosistem TIK untuk menuju Transformasi Digital tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang menghubungkan Sabang hingga Merauke. Pembangunan infrastruktur akan menjadi tidak optimal apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan atau memanfaatkan disrupsi teknologi yang ada terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, Pengenalan TIK sebagai bentuk pelatihan tingkat dasar/*basic*, pelatihan dan/atau sertifikasi DTS sebagai pelatihan tingkat menengah dan mahir hadir sebagai lompatan yang efektif untuk mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki tanah air dengan membekali angkatan kerja muda dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan keahlian spesifik di bidang TIK untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. **Memberikan pelatihan dan sertifikasi tema-tema bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang unggul dan relevan dengan kebutuhan industri kepada calon tenaga kerja dan calon *entrepreneur*; dan**
2. **Menyiapkan kebutuhan SDM Talenta Digital dalam mendukung transformasi digital Indonesia menuju industri 4.0**

2 **Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang Dinyatakan Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis TIK.**

Tujuan indikator ini adalah memfasilitasi pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarakatkan agar dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 jenis pelatihan yang dilaksanakan yakni Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial yang dilaksanakan di Pusdiklat dan BPPTIK.

Pelatihan Teknis Bidang TIK adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan kompetensi teknis di bidang TIK yang terkait dengan pekerjaan ASN sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional dan dapat dilaksanakan secara berjenjang.

Pelatihan Fungsional adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional.

Pelatihan manajerial adalah pelatihan untuk pengembangan kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial ini meliputi pengetahuan terhadap sistem manajemen dan organisasi, dasar-dasar perencanaan, pengendalian internal, perkembangan teknologi informasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, komunikasi efektif dan kepemimpinan. Diklat manajerial juga termasuk Diklat Latsar CPNS baru penerimaan tahun 2023.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) adalah Pendidikan dan pelatihan dalam masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil profesional yang berkarakter berlandaskan pada *core values* ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.¹⁸

3 Persentase (%) Orang yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/Digital yang Lulus Tepat Waktu

Dalam rangka menciptakan SDM nasional bidang kominfo yang kompeten, handal dan profesional serta berdaya saing tinggi melalui pendidikan formal, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan beasiswa S2 dalam negeri dan luar negeri bagi para ASN di seluruh Indonesia, beasiswa luar negeri untuk masyarakat umum yang bergerak dibidang kominfo, beasiswa S2 internal untuk ASN Kementerian Kominfo, serta beasiswa S3 dalam negeri untuk Dosen di Kementerian Kominfo.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan Penerima beasiswa bidang Kominfo menyelesaikan studinya sesuai masa studi normal untuk Kembali berkontribusi kepada unit kerja maupun instansinya masing-masing dengan mengimplementasikan wawasan yang diterima baik secara formal dan informal selama menjalani perkuliahan pascasarjana.

4 Persentase (%) Penyelesaian Pembangunan Prasarana Sekolah Tinggi Multi Media.

Penyelesaian pembangunan prasarana Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) dengan metode konvensional yang merupakan kontrak tahun jamak. Keterangan metode pengukuran:

Tahapan pembangunan prasarana STMM:

- Tahun 2023 : Pelaksanaan Kontrak Konsultan Perencana menghasilkan DED (10%), tersedianya Konsultan MK (10%), dan Pekerjaan Sebagian Konstruksi Bangunan (target fisik 30%).
- Tahun 2024 : Pengawasan berkala Konsultan Perencana, Pengawasan oleh Konsultan MK, dan Penyelesaian Konstruksi Bangunan



¹⁸ https://lan.go.id/?page_id=1872

5 Persentase (%) Realisasi Target PNBP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁹

Realisasi PNBPs BPSDM Kominfo bersumber dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK).

6 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Balitbang SDM Tahun 2023

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

¹⁹ Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Proyek Prioritas	Indikator	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	%									
ProP: Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	50.000	58.116	116,23	50.000	123.412	246,82	50.000	242.862	485,72	50.000	111.409	222,82
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Profesional	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang memperoleh Pelatihan dan Sertifikasi (termasuk Lokus Kawasan Prioritas)	50.000	58.116	116,23	50.000	123.412	246,82	50.000	242.862	485,72	50.000	111.409	222,82
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Penerima Beasiswa S2/S3 yang lulus tepat waktu	90%	87,6%	97,33%	90%	85,71%	95,22%	90%	63,43%	70	95%	77,58%	81,66
ProP: Peningkatan Literasi TIK Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pengenalan TIK	2.000	7.628	381,4	2.200	8.758	398,09	2.500	6.707	268,28	3.000	1.290	43
Pengenalan TIK kepada Masyarakat	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (termasuk lokus kawasan prioritas)	2.000	7.628	381,4	2.200	8.758	398,09	2.500	6.707	268,28	3.000	1.290	43
ProP: Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	1 kajian	1 kajian	100	1 kajian	1 kajian	100	1 kajian	-	-	1 kajian	-	-
Kajian Strategis Penerapan Sistem Big Data Pemerintah	Jumlah Kajian Penerapan Big Data Pemerintah	1 kajian	1 kajian	100	1 kajian	1 kajian	100	1 kajian	-	-	1 kajian	-	-

Tabel 3. 1 Capaian BPSDM Kominfo Kementerian Kominfo Dalam RPJMN

SS.06 Meningkatkan pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis													
		2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	%									
IKSS.07	Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-
SS.07 Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital													
		2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	%									
IKSS.02	Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital	45.520			72.500			72.500	245.377	338,45	72.500	115.450	159,24
	a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas)	35.000	50.032	142,95	60.330	108.053	179,10	60.330	226.068	374,72	60.330	92.902	153,99
	b. ASN	400	748	187	2.000	1.434	71,7	2.000	2.362	118,1	2.000	3.728	175,9
	c. Sertifikasi SKKNI	10.000	11.155	111,55	10.000	15.359	153,59	10.000	16.794	167,4	10.000	18.507	185,07
	d. Beasiswa S2/S3	120	128	106,67	170	173	101,76	170	153	90	170	313	184,12

Tabel 3. 2 Capaian BPSDM Kominfo Dalam Renstra Kementerian Kominfo

		2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	%									
Program Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)													
SP.05 Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM Nasional bidang TIK													
IKP.01	Jumlah peserta pelatihan digital skill* a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas) b. SKKNI	45.000	58.116	129,15	60.000	123.412	205,69	60.000	242.862	404,77	60.000	111.409	185,68
IKP.02	Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu	90	87,6	97,33	90	85,71	95,22	90	63,43%	70	95%	77,58%	81,66
IKP.03	Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TIK, fungsional dan manajerial (kumulatif)	400	748	187	3.400	2.182	64,18	5.400	4.544	84,15	7.500	8.272	110,29
IKP.04	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK* (kumulatif)	2.000	7.628	381,4	4.400	16.386	372,41	10.800	23.093	213,82	15.200	24.383	160,41

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

SP.06 Meningkatnya kualitas riset dan penelitian bidang TIK													
IKP.01	Persentase (%) peningkatan jumlah sitasi jurnal ilmiah terbitan Balitbang	5	1.654,71	33.094	5	373,62	7.472	5	-	-	5	-	-
IKP.02	Persentase (%) hasil riset dan penelitian yang mendukung kebijakan dan pengembangan bidang TIK	100	100	100	100	114,29	114,29	100	-	-	100	-	-
Program Dukungan Manajemen													
SP.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BLSDM yang Bersih dan Efisien													
IKP.01	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BLSDM	76,5	91,71	120,67	78	89,47	114,71	80	90,26	112,83	82	91	110,96
IKP.02	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BLSDM	67	67,20	100,3	68,5	73,31	107,02	70,5	74,8	106,1	72,5	72,85	101,18
IKP.03	Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK BLSDM Berdasarkan	1	0.013	100	1	0,02	100	1	0	200	1	0,68	132

Tabel 3. 3 Capaian Renstra BPSDM Kominfo 2020–2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2020 (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2021 (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2022 (%)
7	Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital	Peserta	45.000	58.116	129,15%	105.772	133.604	126,31%	202.675	242.862	119,83%

Tabel 3. 4 Capaian BPSDM Kominfo Dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2020–2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI 2023	REALISASI 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	1. Persentase (%) Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> yang Kompeten (Eksisting Tahun 2022: 79,33% atau 192.659 Peserta Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> sebanyak 242.862 Peserta)	70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)	83,75% Peserta On Boarding: 106.551 Completion: 89.233	119,64%

Tabel 3. 5 Capaian BPSDM Kominfo Dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023

B. Rincian Capaian Perjanjian Kinerja BPSDM Kominfo Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET	Realisasi 2023	Realisasi 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	1. Persentase (%) Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> yang Kompeten (Eksisting Tahun 2022: 79,33% atau 192.659 Peserta tersertifikasi dari total peserta pelatihan Digital Skill sebanyak 242.862 Peserta)	70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)	83,75% Peserta On Boarding: 106.551 Completion: 89.233	119,64%
		2. Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang Dinyatakan Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional, dan Teknis TIK (Eksisting 2020 s.d. 2022: 4.544 peserta)	90% (2.502 dari Total Target 2.780 ASN)	93,51% (3.486 peserta pelatihan ASN dinyatakan kompeten/lulus pelatihan dari 3.728 peserta ujian dengan total 3.728 peserta pelatihan.	103,9%
		3. Persentase (%) Orang yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/Digital yang Lulus Tepat Waktu (Eksisting Tahun 2022: 63,44% atau 85 peserta lulus dari 134 peserta)	90% (147 dari 165 orang)	77,58% (128 dari 165 orang)	86,20%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Pembangunan Prasarana Sekolah Tinggi Multi Media	50% 1. Tersedianya <i>Detail Engineering Design</i> (10%) 2. Lelang Manajemen Konstruksi (10%) 3. Pekerjaan Konstruksi (30%)	38,77% 1. Tersedianya Detail Engineering Design (10%) 2. Lelang Manajemen Konstruksi (10%) 3. Pekerjaan Konstruksi (18,7%)	77,54%
		5. Persentase (%) Realisasi Target PNPB Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika	100% (Rp. 20.309.000.000,-)	108,90% (Rp 22.115.791.000)	108,90%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan SDM Tahun 2023 (Eksisting 2022 berdasarkan penilaian dari APIP: 90,26)	79,03	91	115,15%
		Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1)	80	90	112,5%

Tabel 3. 6 Capaian BPSDM Kominfo Dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun 2023

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Perbandingan Capaian Kinerja BPSDM Kominfo dari Tahun Anggaran 2020 s.d. 2022

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika.	Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika.	60%	100%	166,67%
2.	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika.	1. Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program <i>Digital Talent Scholarship</i> (DTS).	45.000	58.116	129,15%
		2. Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> dari Kategori <i>Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy</i> yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri.	20%	33,7%	168,5%
		3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis.	90%	95,5%	106,11%

3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola BPSDM Kominfo.	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) BPSDM Kominfo.	76,5	91,71	120,67%
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BPSDM Kominfo.	67	67,20	100,3%
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Kominfo Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran BPSDM Kominfo Tahun 2019.	1%	0.012	100%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Kominfo Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN.	a. Tahun berjalan: 70% b. Tahun sebelumnya: 30%	a. Tahun berjalan: 100% b. Tahun sebelumnya: 30%	100%
		5. Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Kominfo.	86	92,75	107,85%

Tabel 3. 7 Capaian BPSDM Kominfo Dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun 2020

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2021	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	1. Jumlah Peserta Pengenalan TIK, dan Pelatihan Digital/TIK: a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas) dan SKKNI b. Masyarakat yang mendapatkan pengenalan TIK c. ASN	a. 100.000 Peserta b. 4.400 Orang c. 1.372 ASN	a. 123.412 Peserta b. 8.758 Orang c. 1.434 ASN	a. 123,41 b. 199,05 c. 104,52
		2. Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu	90% (dari 147 orang sesuai SK penetapan penerima beasiswa)	85,71% (126 mahasiswa lulus tepat waktu dari target 147 orang)	95,22
2.	Meningkatnya kualitas riset dan penelitian bidang TIK	Persentase (%) hasil riset dan penelitian yang mendukung kebijakan dan pengembangan bidang TIK	100%	114,29%	114,29
3.	Tercapainya target PNBP BLSDM	Realisasi Target PNBP BLSDM	100% (Rp. 18.843.150.000)	111,25% (Rp 20.984.078.850)	111,25

Tabel 3. 8 Capaian BPSDM Kominfo Dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun 2021

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2022	REALISASI 2022	% REALISASI 2022 (5/4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	1. Jumlah Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> a. SDM Umum (Termasuk Kawasan Prioritas) b. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	200.000 Peserta a. 186.000 Peserta b. 14.000 Peserta	242.862 a. 226.068 peserta b. 16.794 peserta	121,43%
		2. Jumlah ASN Nasional yang Mendapatkan Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial	2.675 Peserta ASN	2.362 Peserta ASN	88,3%
		3. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/Digital yang Lulus Tepat Waktu	90% (dari 134 Mahasiswa)	63,43% (85 mahasiswa lulus tepat waktu dari target 134 mahasiswa)	70,48%
2.	Tercapainya target PNBP Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase (%) Realisasi Target PNBP Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100% (Rp.19.309.000.000)	116,37% (Rp 22.469.829.500)	116,37%
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80 (skala 1-100)	90,26	112,83

Tabel 3. 9 Capaian BPSDM Kominfo Dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun 2022

RINCIAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BPSDM KOMINFO TA 2023

SP.1 Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK

Untuk mencapai Sasaran Program (SP) tersebut perlu didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu sebagai berikut:

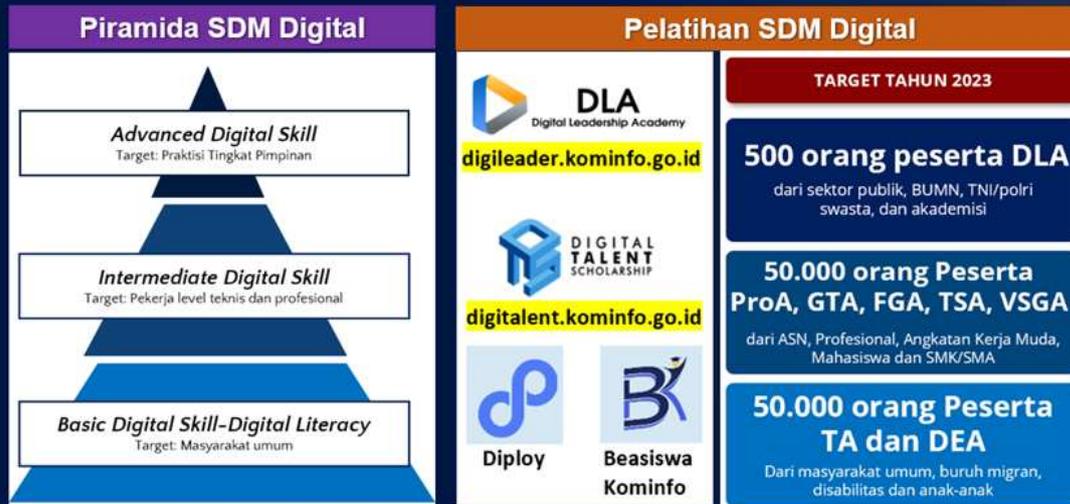
IKSP 1.1. Persentase (%) Peserta Pelatihan *Digital Skill* yang Kompeten

SP.1 MENINGKATNYA KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN SDM NASIONAL BIDANG TIK				
NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	% REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase (%) Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> yang Kompeten (Eksisting Tahun 2022: 79,33% atau 192.659 Peserta tersertifikasi dari total peserta pelatihan <i>Digital Skill</i> sebanyak 242.862 Peserta)	70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)	83,75% Peserta On Boarding: 106.551 Completion: 89.233	119,64%

Tabel 3. 10 IKSP 1.1. Persentase (%) Peserta Pelatihan *Digital Skill* yang Kompeten

IKSP ini merupakan gambaran program pengembangan SDM dengan jenis pelatihan, sasaran peserta serta tingkat kesulitan yang memiliki karakteristik masing-masing, yakni *Digital Talent Scholarship* (DTS) yang terdiri atas 8 Akademi. Dalam tingkatan kecakapan digital, DTS mengambil peran di level *Advanced*, *Intermediate*, dan *Basic*, yang dapat dilihat pada bagan berikut:

Strategi Penyediaan Talenta Digital Indonesia



No	Akademi	Keterangan
1.	DLA (Digital Leadership Academy)	Pelatihan Digital untuk para pimpinan
2.	ProA (Profesial Academy)	Untuk Upskilling dan Reskilling Kompetensi
3.	FGA (Fresh Graduate Academy)	Pelatihan untuk pemagangan ke Industri
4.	GTA (Government Transformation Acad.)	Untuk kompetensi teknis para ASN
5.	VSGA (Vocasional School Grad. Acad.)	Pelatihan & Sertifikasi berbasis SKKNI
6.	TSA (Talent Scouting Academy)	Untuk mendukung program MBKM
7.	TA (Tematic Academy)	Pelatihan dengan Tema Khusus
8.	DEA (Digital Entrepreneurship Academy)	Untuk kompetensi Kewirausahaan Digital

Tujuan utama program DTS adalah mengurangi kesenjangan kemampuan digital di Indonesia baik dari Indonesia bagian Barat sampai dengan bagian Timur. Indonesia perlu menyelaraskan pasokan keterampilan dengan permintaan industri yang terus berkembang dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar serta wilayah Indonesia bagian Barat namun juga melebarkan manfaat program ini ke wilayah Timur dan daerah 3T. Selain itu, kolaborasi antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, juga perlu dijalin lebih erat untuk menjembatani antara kebutuhan dan permintaan.

Dengan dukungan mitra kerja dan pelaksana, perumusan ulang skema dan adaptasi di masa pandemi, membuat DTS 2023 dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan 8 akademi DTS, yaitu:

1. *Vocational School Graduate Academy (VSGA)* adalah salah satu bagian dari program DTS dengan target peserta lulusan SMK dan D3/D4 bidang TIK, Telekomunikasi, Multimedia, DKV, Elektro, serta yang terkait dan belum atau tidak sedang bekerja. Akademi ini sebelumnya juga dikenal dengan program sertifikasi kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan materi pelatihan serta sertifikasi peserta VSGA merupakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi SKKNI. Di akhir pelatihan, dilaksanakan sertifikasi berbasis SKKNI yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

SKKNI merupakan standar kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan persyaratan jabatan yang ditetapkan. Di bidang komunikasi dan informatika, SKKNI telah diberlakukan penerapannya secara resmi melalui terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika. Pasal 5 Peraturan tersebut mengatur bahwa SKKNI Bidang Kominfo harus

diberlakukan terhadap tenaga kerja industri, baik tenaga kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Asing, yang keahlian atau keterampilannya di bidang komunikasi dan informatika. Oleh karena itu, Program VSGA DTS 2023 menyiapkan talenta digital lulusan vokasi melalui pelatihan dan sertifikasi yang berbasis SKKNI bidang komunikasi dan informatika.

2. *Professional Academy (ProA)*, target peserta yaitu untuk peserta umum bertujuan untuk mempersiapkan alih kompetensi SDM Indonesia dengan cara memberikan pelatihan secara online kepada masyarakat yang sedang bekerja agar tercipta tenaga kerja Indonesia yang lebih adaptif dan produktif. ProA juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia di bidang TIK sebagai bagian dari upaya alih kompetensi dan meningkatkan daya saing. Akademi ini pada tahun 2020 disebut sebagai *Online Academy (OA)*.
3. *Digital Entrepreneurship Academy (DEA)*, target peserta yaitu untuk peserta umum. Sasaran program ini adalah mencetak *Digital Entrepreneur (Digipreneur)* baru.
4. *Fresh Graduate Academy (FGA)*, target peserta yaitu untuk lulusan D3, D4, S1 bidang TIK, MIPA dan Teknik yang belum atau tidak sedang bekerja untuk mempersiapkan para lulusan agar memiliki kompetensi profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0 agar dapat bersaing baik di industri dalam maupun luar negeri.

- 5 *Thematic Academy (TA)*, target peserta yaitu untuk peserta umum yang ditujukan spesifik pada sektor industri/kalangan tertentu, dimana kurikulumnya telah disesuaikan dengan kebutuhan industri.
- 6 *Government Transformation Academy* bertujuan meningkatkan kompetensi ASN dalam mendukung akselerasi transformasi digital di instansi Pemerintah. Akademi ini pada tahun 2020 disebut sebagai *Regional Development Academy (RDA)*.

- 7 *Talent Scouting Academy* ditujukan untuk pelatihan dan pemagangan di perusahaan teknologi global bagi mahasiswa berprestasi mitra kerja sama Kominfo yang sudah mencapai tingkat akhir. Akademi ini merupakan akademi yang baru diluncurkan di tahun 2021.
- 8 *Digital Leadership Academy (DLA)* adalah akademi yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemimpin baik dari sektor pemerintahan, akademisi, maupun swasta untuk mendukung transformasi digital melalui perumusan kebijakan kolaboratif dan mendorong sinergisitas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri digital sehingga meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, DTS tahun 2023 juga melibatkan mitra *global technology* untuk memberikan sertifikasi internasional kepada peserta yang memenuhi syarat di akademi tertentu. BPSDM Kominfo juga bekerja sama dengan BUMN dan perusahaan swasta untuk menyalurkan peserta dari kalangan mahasiswa dalam program pemagangan setelah mengikuti pelatihan.

Capaian DTS Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dan UPT di lingkungan BPSDM Kominfo secara akumulasi dapat dilihat pada matriks berikut:

Akademi	Target DIPA	Target Optimalisasi	Pendaftar	Diterima	Peserta/ Onboarding	Menyelesaikan Pelatihan/ Completion	Berhak Sertifikasi Lanjutan	Ikut Sertifikasi Lanjutan	Lulus Sertifikasi/ <u>Kompeten</u>
FGA	4.000	8.000	30.348	12.316	10.256	7.473	2.465	2.063	1.665
VSGA	10.000	20.000	30.806	20.314	18.507	14.816	14.816	13.649	11.589
TA	8.000	16.000	25.468	20.603	18.221	15.364	0	0	0
Pro A	4.000	8.000	18.058	14.288	10.098	7.383	2.190	2.041	1.517
DEA	16.500	33.000	53.957	40.508	35.496	30.774	0	0	0
GTA	6.000	12.000	15.654	13.481	12.801	11.167	0	0	0
TSA	1.400	2.800	9.718	6.318	5.705	5.208	1.070	911	816
DLA	100	200	457	332	325	275	0	0	0
Total	50.000	100.000	184.466	128.160	111.409	92.460	20.541	18.664	15.587

*) data per 10 Januari 2024

Gambar 3.1 Capaian DTS Tahun 2023

Mulai tahun 2022, menindaklanjuti arahan Inspektorat Jenderal dan berdasarkan kesepakatan pada rapat pimpinan di lingkungan BPSDM Kominfo yang dituangkan pada Nota Dinas Kepala BPSDM Kominfo Nomor 41/BLSDM/PR.04.04/03/2023 tanggal 7 Maret 2022 tentang Definisi Peserta DTS dan DLA TA 2023, definisi kriteria perekaman data berdasarkan *chart* di atas adalah sebagai berikut:

- **Pendaftar:** Jumlah Pendaftar yang membuat akun di laman digitalent.kominfo.go.id (DTS) dan digileader.kominfo.go.id (DLA).
- **Diterima:** Jumlah Peserta lolos seleksi substansi atau *eligible* sebagai peserta dan tercantum di SK Peserta Akademi dan/atau Berita Acara Sidang Penetapan Peserta.
- **Peserta/Onboarding:** Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan minimal 10% dari total durasi jam pelatihan.
- **Menyelesaikan Pelatihan/Completion:** Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan dengan ketentuan minimal dari total pertemuan sesuai ketentuan masing-masing akademi dan berhak mendapatkan Sertifikat *Completion*.
- **Berhak Sertifikasi Lanjutan:** Dilihat dari peserta *Completion*, berapa jumlah peserta yang skornya berhak mengikuti Sertifikasi.
- **Ikut Sertifikasi Lanjutan:** Jumlah peserta yang mengikuti ujian sertifikasi.
- **Lulus Sertifikasi (Kompeten):** Jumlah peserta ujian sertifikasi yang berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi.

Sementara itu, perhitungan peserta bersertifikasi dihitung dengan metode pengukuran sesuai Manual Indikator Pengukuran sebagai berikut:

1. **FGA**

Peserta FGA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 sesuai dengan kriteria masing-masing mitra pelatihan

2. **VSGA**

Peserta VSGA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang lulus sertifikasi kompetensi

3. **GTA**

Peserta GTA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi ketentuan ketidakhadiran tidak lebih dari 10% dari total jam pelatihan dan memenuhi nilai akhir minimal 65 terdiri atas *pre test*, penugasan, dan *post test*

4. **DEA**

Peserta DEA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti pelatihan, mencapai nilai *post test* minimal 60 dan atau mengumpulkan salah satu dari tugas pendampingan

5. **TA**

Peserta TA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 yang terdiri atas: penilaian absensi, *post test/final exam* dan atau kuis/tugas

6.

Peserta ProA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi kriteria kelulusan oleh mitra pelatihan ProA

7. TSA

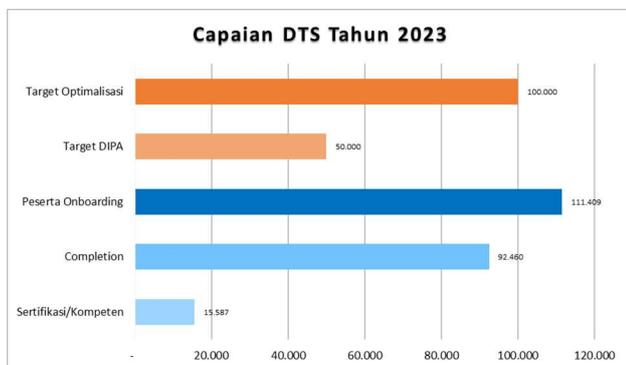
Peserta TSA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 sesuai dengan kriteria masing-masing mitra pelatihan

8. DLA

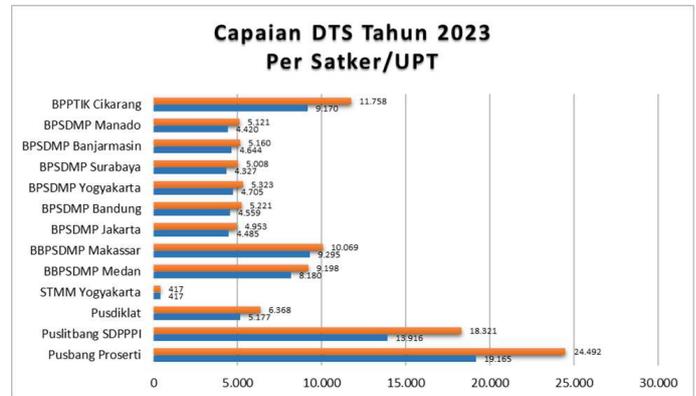
Peserta DLA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi ketentuan ketidakhadiran tidak lebih dari 20% dari total jam pelatihan dan menyusun *output* pembelajaran berupa rencana aksi baik secara individu dan/atau kelompok.

Apabila diakumulasikan, berikut rekap peserta DTS 8 akademi pada setiap tahapan alur pelaksanaan mulai dari Pendaftar sampai dengan Sertifikat Kompetensi (apabila ada pada akademi tertentu):

Sebaran Peserta DTS

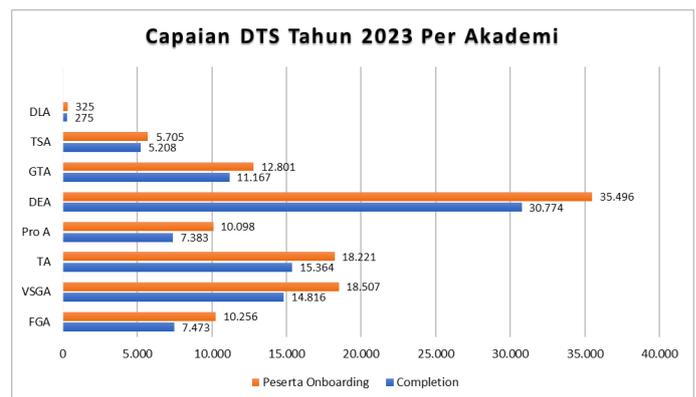


*) data per 10 Januari 2024



*) data per 10 Januari 2024

Gambar 3.2 Capaian DTS per Satker/UPT



*Rekap pertanggal 10 Januari 2024

Gambar 3.3 Capaian DTS per Akademi

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Dari perhitungan realisasi kinerja di atas, dapat diperhitungkan bahwa perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja IKSP Persentase (%) Peserta Pelatihan *Digital Skill* yang Kompeten adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{peserta pelatihan digital skill yang mendapatkan sertifikat} = 89.233}{\sum \text{peserta pelatihan digital skill} = 106.551} \times 100\% = 83,75\%$$

Jumlah peserta Onboarding DTS sebanyak 111.409 orang merupakan akumulasi dari 8 akademi DTS dengan memperhitungkan peserta *Onboarding* yang memenuhi kriteria kehadiran minimal 10% dari total jam pelajaran (JP) dibandingkan dengan jumlah peserta menyelesaikan pelatihan dan jumlah peserta tersertifikasi (VSGA).

Namun, karakter pelatihan VSGA berbeda dengan akademi lain. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan VSGA, peserta yang terhitung sebagai peserta kompeten dalam pelatihan VSGA adalah jumlah peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi dari jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi. sehingga, terdapat perbedaan perhitungan jumlah peserta kompeten dengan akademi lain. maka, perhitungan jumlah peserta kompetensi dari total peserta adalah sebagai berikut:

Akademi	Peserta/ <i>Onboarding</i>	Menyelesaikan Pelatihan/ <i>Completion</i>	Berhak Sertifikasi Lanjutan	Ikut Sertifikasi Lanjutan	Lulus Sertifikasi/ Kompeten
FGA	10.256	7.473	2.465	2.063	1.665
VSGA	18.507	14.816	14.816	13.649	11.589
TA	18.221	15.364	0	0	0
Pro A	10.098	7.383	2.190	2.041	1.517
DEA	35.496	30.774	0	0	0
GTA	12.801	11.167	0	0	0
TSA	5.705	5.208	1.070	911	816
DLA	325	275	0	0	0
Total	111.409	92.460	20.541	18.664	15.587

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Perhitungan Capaian PK

Akademi	Peserta Kompeten	Peserta <i>Onboarding</i> /Ikut Sertifikasi Lanjutan*)	%Capaian PK
FGA	7.473	10.256	72,86%
VSGA	11.589	13.649	84,91%
TA	15.364	18.221	84,32%
Pro A	7.383	10.098	73,11%
DEA	30.774	35.496	86,70%
GTA	11.167	12.801	87,24%
TSA	5.208	5.705	91,29%
DLA	275	325	84,62%
Total	89.233	106.551	83,75%

*) VSGA

Dari total Peserta *Onboarding* akumulasi seluruh akademi sebanyak 111.409 orang, sebanyak 89.233 dinyatakan menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan sertifikasi (*completion/kompeten*) dari total 106.551 orang yang menyelesaikan pelatihan dan/atau mengikuti sertifikasi lanjutan.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Sumber dana IKSP Jumlah Peserta Pelatihan *Digital Skill* merupakan gabungan dari 8 Akademi DTS yang berasal dari Rupiah Murni (RM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kominfo.

Pagu IKSP ini sebesar Rp 123.498.285.000 dengan realisasi anggaran IKSP ini adalah Rp 122.657.362.687 (99,32%). Dengan kata lain, terdapat pagu Rp 840.922.313 atau senilai 0,68% sisa anggaran.

Namun, realisasi anggaran tidak menggambarkan capaian kinerja yang berhasil diupayakan. Pelaksanaan kegiatan dengan kombinasi antara daring, luring dan *hybrid* terbukti efektif menghemat anggaran dengan realisasi kinerja yang melebihi target awal.

Faktor Pendukung

- Penjadwalan pelaksanaan pelatihan yang sistematis dan teratur.
- Pemutakhiran dan pengajian berkala tema pelatihan yang benar-benar dibutuhkan serta bermanfaat bagi masyarakat.
- Sistem DTS (*digitalent.kominfo.go.id*) yang stabil memudahkan peserta pelatihan baik ketika mendaftar maupun mengakses materi pelatihan.
- Dengan penerapan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kegiatan, satker dan UPT memiliki pedoman dasar sehingga tidak terdapat kerancuan dan terdapat keseragaman pelaksanaan.
- Jalinan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah sebagai mitra mempermudah pelaksana kegiatan menjaring peserta di lokasi penyelenggaraan pelatihan. Apabila target peserta belum tercapai pada tema pelatihan tertentu, maka mitra kerja sama dapat mencari peserta cadangan yang berasal dari jaringan mitra.
- Satker/UPT pelaksana DTS juga menerapkan *sharing cost* dengan Pemda. Misalnya, Pemda menyediakan lokasi, *device* dan konsumsi pelatihan dan BPSDM menyediakan instruktur pelatihan. Bahkan, mitra Pemda daerah tertentu juga bersedia menyediakan seluruh fasilitas pendukung.
- Dengan adanya kerja sama dengan Lembaga yang dapat menyediakan sertifikat *global tech companies*, cukup meningkatkan animo peserta completion untuk mengambil sertifikasi lanjutan. Pada pelaksanaan akademi yang memberikan kesempatan sertifikasi lanjutan bagi pesertanya di tahun-tahun sebelumnya, biaya yang harus dibayarkan sebelum sertifikasi cukup dirasa berat bagi peserta. Hal ini dikarenakan, peserta harus langsung mendaftarkan diri dan mengikuti sertifikasi secara langsung dari mitra *glo-tech* melalui akun masing-masing. Lalu kemudian, BPSDM Kominfo akan mengganti pengeluaran sertifikasi tersebut secara *reimburse*. Kondisi tersebut cukup memberatkan dari sisi biaya dan tidak semua peserta memiliki kartu kredit untuk melakukan pembayaran.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala



Pelatihan Thematic Academy (TA) Design Grafis bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Pamekasan, 27 Februari – 1 Maret 2023



Training of Trainers (TOT) Pelatihan Sosial Kultural Jenjang 1 dan Jenjang 2 Kominfo secara Daring dan Luring pada 2 - 4 Agustus 2023

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**

Faktor penghambat/kendala

- Masih banyaknya *drop rate* peserta (tidak aktif mengikuti pelatihan setelah diterima pelatihan) terutama pada pelatihan skema daring dengan durasi panjang. Terjadi juga peserta yang masih diberi penugasan kantor saat pelatihan walaupun peserta sudah dibekali surat tugas
- Masih terdapat kendala mengenai peserta yang tidak ikut pelatihan saat dinyatakan diterima (*drop rate*), dan tidak bertahan mengikuti pelatihan sampai selesai, karena beberapa kendala seperti misal tidak dapat mengikuti pelatihan, jangka waktu yang panjang, tidak ada kuota, ataupun perangkat yang tidak mumpuni (misal tidak memiliki *desktop/laptop*) namun ada juga yang tidak dapat melanjutkan pelatihan karena telah diterima bekerja (dalam hal ini berarti baik karena telah diterima bekerja)
- Tingkat kelulusan rendah pada peserta pelatihan data science untuk guru SMA/SMK dikarenakan durasi pelatihan yang panjang dan dilaksanakan secara online, serta peserta pelatihan yang mempunyai kesibukan sehingga tidak dapat mengikuti pelatihan secara keseluruhan
- Peserta pelatihan SD dan SMP cukup kesulitan dalam mendaftar pelatihan dikarenakan belum begitu paham cara mendaftar. Namun hal ini dapat diatasi dengan cara memberikan pendampingan kepada anak SD dan SMP terkait cara mendaftar pelatihan
- Proses pendaftaran peserta pelatihan SD/SMP harus melampirkan *form* kesediaan dari ortu untuk memberikan data pribadi yang dibutuhkan dalam pelatihan. Sehingga proses pendaftaran di sisi peserta memerlukan waktu agak lama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan/kendala

- Sinergi lebih intens antara pokja pusat dan UPT pelaksana sekaligus melibatkan mitra (pemda, perguruan tinggi, dll) setempat terutama yang telah menjalin kerja sama dengan BPSDM kominfo sehingga para pihak dapat saling berkontribusi sesuai skema dan ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati dalam dokumen kerja sama.
- Monitoring pelaksanaan pelatihan berbasis kerja sama dengan pemda dan perguruan tinggi dilakukan melalui *dashboard* dts.
- Dalam rangka optimalisasi kerja sama dan apresiasi dengan mitra pelatihan, BPSDM kominfo juga menyelenggarakan *event* penghargaan dengan mengundang mitra, pengajar, dan *stakeholder*. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap para pihak yang mendukung dan terlibat dalam kegiatan DTS. Diharapkan kegiatan ini dapat memacu *stakeholder* terkait di kemudian hari.
- *Engagement* antara panitia pelaksana dengan peserta perlu lebih ditingkatkan untuk mengurangi *drop rate* terutama pada pelatihan daring. Dapat dilaksanakan dengan memberi *give away* atau *souvenir/merchandise* DTS, *reminder* berkala sebelum *live session*, tawaran pelatihan lanjutan, penobatan *best student*.
- Menggunakan instruktur yang berasal dari internal kominfo sehingga pelatihan dapat dilaksanakan secara paralel untuk mengefektifkan waktu dan menghemat anggaran
- Pelaksanaan pelatihan secara luring untuk mengakomodir daerah yang memiliki akses internet terbatas. Selain itu, satker UPT pelaksana juga menyediakan fasilitas kuota bagi peserta pelatihan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sinyal internet.
- Peserta yang akan mengikuti sertifikasi lanjutan namun terkendala koneksi internet dapat mengikuti sertifikasi secara luring di *test centre mitra*.
- Pemilihan lokasi dan penentuan akademi serta tema pelatihan disesuaikan dengan kondisi yang diidentifikasi pada indeks masyarakat digital indonesia (imdi) tahun 2022.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR E

Rekomendasi

- ✓ Pelatihan dan sertifikasi DTS masih tetap akan diselenggarakan secara daring dan luring karena setelah diidentifikasi, masing-masing metode dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan. Pelaksanaan masing-masing tema dapat disesuaikan kembali dengan durasi serta pertimbangan rencana lokasi.
- ✓ Pertimbangan pelaksanaan tema pelatihan dan lokasi pelatihan berdasarkan hasil skor IMDI sehingga *treatment* terhadap lokasi tertentu tidak dapat disamakan dengan *treatment* pada lokasi lain. Beberapa UPT telah menyelenggarakan pelatihan DTS dengan memperhatikan skor IMDI daerah tersebut.
- ✓ Membangun relasi kemitraan yang intens dengan mitra kerja sama baik Pemda maupun *global technology company* untuk menekan pengeluaran anggaran dengan *sharing* biaya maupun *sharing* kontribusi lainnya.
- ✓ Memilih lokasi pelatihan yang dapat menekan biaya akomodasi dan sewa seperti misalnya di sekolah dan Gedung/bangunan Pemda.
- ✓ Hanya memberikan insentif penggantian pulsa kepada peserta, hal ini juga untuk menghindari peserta mengikuti pelatihan hanya untuk mengejar imbalan dalam bentuk uang.
- ✓ Tidak memberikan uang saku dan akomodasi pada peserta.
- ✓ Pemilihan lokasi dan penentuan akademi serta tema pelatihan disesuaikan dengan kondisi yang diidentifikasi pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2022.

IKSP 1.2. Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang Dinyatakan Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional, dan Teknis TIK

SP.1 MENINGKATNYA KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN SDM NASIONAL BIDANG TIK				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	% REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang Dinyatakan Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional, dan Teknis TIK (Eksisting 2020 s.d. 2022: 4.544 peserta)	90% (2.502 dari Total Target 2.780 ASN)	93,51% (3.486 peserta pelatihan ASN dinyatakan kompeten/lulus pelatihan dari 3.728 peserta ujian dengan total 3.728 peserta pelatihan.	103,9%

Tabel 3. II IKSP 1.2. Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang Dinyatakan Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional, dan Teknis TIK

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral, dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 70 ayat 1 dan 2 bahwa setiap ASN memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan Kompetensi. Pengembangan Kompetensi tersebut melalui Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Kursus dan Penataran.²⁰ Pengembangan kompetensi bagi PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun (Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil).²¹

Pelatihan ASN dilaksanakan oleh Pusdiklat dan BPPTIK Cikarang secara daring, luring dan *hybrid*. Pusdiklat melayani diklat teknis, diklat fungsional, dan diklat manajerial (termasuk diklat untuk peserta internal Kementerian Kominfo). Sementara itu, BPPTIK Cikarang melayani diklat teknis. Berikut akumulasi capaian diklat teknis untuk ASN tahun 2023:

	Peserta Pelatihan	Peserta Ujian	Kompeten/Lulus	%
Diklat Manajerial	92	92	76	82,61
Diklat Fungsional	668	668	635	95,06
Diklat Teknis	2968	2968	2775	93,50
TOTAL	3728	3728	3486	93,51

Sebaran Peserta Pelatihan Aparatur Per Satuan Kerja/UPT (Pusdiklat dan BPPTIK)

	Peserta Pelatihan	Peserta Ujian	Kompeten/Lulus	% Kompeten
PUSDIKLAT				
Diklat Manajerial	92	92	76	82,61
Diklat Fungsional	668	668	635	95,06
Diklat Teknis	2412	2412	2274	94,28
	3172	3172	2985	94,10

Gambar 3. 7 Capaian Diklat Aparatur di Pusdiklat tahun 2023

	Peserta Pelatihan	Peserta Ujian	Kompeten/Lulus	% Kompeten
BPPTIK CIKARANG				
Diklat Teknis	556	556	501	90,11

Gambar 3. 8 Capaian Diklat Aparatur di BPPTIK tahun 2023

²⁰ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja IKSP 1.2 ini adalah:

$$\frac{\sum \text{ASN yang mendapatkan sertifikat pelatihan manajerial, fungsional dan teknis TIK Tahun 2023} = 3.486}{\sum \text{ASN yang mengikuti pelatihan manajerial, fungsional dan teknis TIK Tahun 2023} = 3.728} \times 100\% = 93,51\%$$

Perhitungan persentase realisasi kinerja IKSP 1.2 ini adalah:

$$\frac{\% \text{ Realisasi} = 93,51\%}{\% \text{ Target} = 90\%} \times 100\% = 103,9\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya, IKSP 1.2 memiliki pagu sebesar Rp 24.069.364.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23.574.067.360 atau sekitar 97.94% pada TA 2023. Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 495.296.640 (2.06%) yang tidak terealisasi.

Faktor Pendukung

1. Ketersediaan SDM
2. Ketersediaan anggaran
3. Sarana dan Prasarana Pelatihan
4. Adanya aturan mengenai Indeks Prestasi ASN (IP ASN) dalam rangka peningkatan kompetensi teknis ASN minimal mendapatkan 20 JP pelatihan dalam satu tahun
5. Dorongan dari Pemda untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan yang diikuti

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala



Pelatihan UN APCICT Frontier ICTs for Sustainable Development (Artificial Intelligence, Internet of Things, and Blockchain) tanggal 30 Agustus – 1 September 2023

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Faktor Penghambat/Kendala	Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala
<ul style="list-style-type: none"> • Peserta tidak menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan/mengundurkan diri karena adanya penugasan saat pelatihan • Peserta tidak fokus dengan pelatihan karena masih dibebani pekerjaan oleh instansi nya masing-masing • Tingkat kelulusan pada pelatihan tertentu seperti Pelatihan Pengadaan Barang Jasa dan <i>Digital Mindset</i> masih kurang • Terbatasnya ketersediaan kelas dan asrama saat mengadakan beberapa pelatihan di waktu yang bersamaan • LMS Pusdiklat tidak lagi digunakan karena LMS dipusatkan pada LMS Digitalent 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat form komitmen mengikuti pelatihan yang ditandatangani oleh peserta dan atasan langsung peserta • Meningkatkan peran pengajar/<i>coach</i> di kelas dan memfasilitasi modul untuk belajar mandiri • Membuat jadwal pelaksanaan pelatihan dan informasi penggunaan sarana prasarana • Penggunaan LMS Digitalent untuk peserta pelatihan diklat aparatur

Rekomendasi

- 1 Membuka kesempatan pegawai untuk mengusulkan tema diklat tertentu sesuai kebutuhan kompetensi pada pekerjaan maupun formasinya.
- 2 Penggunaan fasilitas sarana prasarana perlu lebih dioptimalisasi untuk meningkatkan kenyamanan dan ketertarikan calon peserta diklat.
- 3 Tema diklat perlu disesuaikan dengan kebutuhan internal pegawai Kementerian Kominfo baik berstatus ASN maupun non ASN.

IKSP 1.3. Persentase (%) Orang yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/Digital yang Lulus Tepat Waktu

SP.1 MENINGKATNYA KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN SDM NASIONAL BIDANG TIK				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	% Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Persentase (%) Orang yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/Digital yang Lulus Tepat Waktu (<u>Eksisting Tahun 2022: 63,44% atau 85 peserta lulus dari 134 peserta</u>)	90% (147 dari 165 orang)	77,58% (128 dari 165 orang)	86,20%

Tabel 3. 12 IKSP 1.3. Persentase (%) Orang yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/Digital yang Lulus Tepat Waktu

Dalam rangka menciptakan SDM nasional bidang kominfo yang kompeten, andal dan profesional serta berdaya saing tinggi melalui pendidikan formal, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan beasiswa S2 dalam negeri dan luar negeri bagi para ASN di seluruh Indonesia, beasiswa luar negeri untuk masyarakat umum yang bergerak dibidang kominfo, beasiswa S2 internal untuk ASN Kementerian Kominfo. Program beasiswa dalam negeri diselenggarakan bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia termasuk yang telah menjalin kerja sama melalui program DTS. Apabila dilihat pada piramida tingkat kecakapan digital, maka peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan formal pascasarjana merupakan bentuk pengembangan SDM pada tingkat lanjutan/*advance*.

Karakteristik IKSP 1.3. ini adalah mengidentifikasi tingkat kelulusan mahasiswa penerima beasiswa sesuai masa studi normal yakni antara 3-4 semester dari *intake* atau penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 atau 2022.

Berikut daftar mitra perguruan tinggi tujuan studi dimaksud:

Beasiswa S2 Informatika

Program Beasiswa S2 Bidang Informatika bekerja sama dengan 5 (lima) Perguruan Tinggi. Berikut rekap prodi dan perguruan tinggi yang menjalin kerja sama beasiswa jurusan Informatika, yaitu:

No.	Perguruan Tinggi	Fakultas	Program Studi
1		Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI)	Magister Teknologi Informasi (MTI)
2		Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Departemen Teknik Elektro	Magister Manajemen Keamanan Jaringan Informasi (MKJI)
3		Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI – ITB)	Magister Teknik Elektro Opsi Layanan Teknologi Informasi (LTI)
4		Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI – ITB)	Magister Teknik Elektro Opsi Rekayasa dan Manajemen Keamanan Informasi (RMKI)
5		Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Magister Teknologi Informasi (MTI) <i>e-Government</i>
6		Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Departemen Teknik Elektro	Magister Bidang Keahlian Telematika Pengelola TIK Pemerintahan (PeTIK)
7		Fakultas Hukum	Magister Ilmu Hukum Kekhususan Regulasi Digital

Tabel 3. 13 Program Studi Beasiswa S2 Informatika

Beasiswa S2 Komunikasi

Program Beasiswa S2 Ilmu Komunikasi bekerja sama dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi, yaitu:

No.	Perguruan Tinggi	Fakultas	Program Studi
1		Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI)	Ilmu Komunikasi
2		Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM)	Ilmu Komunikasi
3		Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (UNS)	Ilmu Komunikasi
4		Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair)	Media dan Komunikasi
5		Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand)	Ilmu Komunikasi
6		Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU)	Ilmu Komunikasi
7		Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas)	Ilmu Komunikasi

Tabel 3. 14 Program Studi Beasiswa S2 Komunikasi

Beasiswa S3 Dalam Negeri Internal (Paket)

1		Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (Universitas Pendidikan Indonesia)	Pendidikan Program Doktor Manajemen
---	---	---	-------------------------------------

Beasiswa S2 Luar Negeri

Program studi, perguruan tinggi dan negara tujuan program beasiswa S2 luar negeri yang mahasiswanya akan lulus pada tahun 2023 adalah:

No	Negara	Universitas	Course
1	RRT	Tsinghua University	Master of Public Administration in International Development (MID)
2	India	International Institute of Information Technology Bangalore (IIIT-B)	MSc in Digital Society
3	Belanda	University of Twente	MSc in Communication Science
4	Belanda	Erasmus University Rotterdam	MSc in Business Information Management
5	Belanda	The Hague University of Applied Sciences	Master in International Communication Management
6	Belanda	Groningen University	MSc in Marketing, Digital Business Focus Area

Tabel 3.15 Program Studi Beasiswa S2 Luar Negeri

Target IKSP ini adalah kelulusan mahasiswa penerima beasiswa tepat waktu sesuai masa studi normal yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing yaitu sebanyak 165 orang dengan memperhitungkan mahasiswa *intake* 2021 dan 2022 dengan masa studi normal sesuai kurikulum masing-masing prodi.

Perguruan Tinggi	Target Lulus 2023	Jumlah Lulus Tepat Waktu 2023	%Kelulusan
Komunikasi			
USU	8	7	88%
UNAND	10	8	80%
UI	9	8	89%
UGM	10	8	80%
UNS	10	7	70%
UNAIR	9	5	56%
UNHAS	10	8	80%
INTERNAL	8	6	75%
Informatika			
ITS	9	9	100%
UI MTI	16	13	81%
UI MKJI	15	15	100%
UGM MTI	10	1	10%
UGM MKIK	10	8	80%
ITB	16	10	63%
Luar Negeri			
IIITB	2	2	100,00%
TSINGHUA UNIVERSITY	5	5	100,00%
UNIVERSITY OF TWENTE - BELANDA	6	6	100,00%
EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY	3	2	66,67%
TOTAL	165	128	77,58
% Kelulusan		% Capaian Target Kelulusan (90%)	
77,58%		86,20%	

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kelulusan Penerima Beasiswa S2 Tepat Waktu Tahun 2023

Beasiswa	Target	Realisasi	%
Dalam Negeri-Bidang Komunikasi	66	51	77,27%
Dalam Negeri-Bidang Informatika	76	56	73,68%
Luar Negeri	15	15	100,00%
Internal	8	6	75,00%
Jumlah	165	128	77,58%

Gambar 3. 9 Capaian Kelulusan Beasiswa S2 Kominfo tahun 2023

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

$$\frac{\sum \text{Kelulusan Penerima Beasiswa Tepat Waktu Tahun 2023} = 128 \text{ Peserta}}{\sum \text{Target Kelulusan Penerima Beasiswa Tepat Waktu Tahun 2023} = 165 \text{ Peserta}} = 77,58\%$$

Dengan target awal kelulusan tepat waktu sebesar 90%, maka persentase capaian IKSP ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \% \text{Kelulusan Penerima Beasiswa Tepat Waktu Tahun 2023} = 77,58\%}{\sum \& \text{Target Kelulusan Penerima Beasiswa Tepat Waktu Tahun 2023} = 90\%} \times 100\% = 86,20\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya, IKSP ini memiliki pagu sebesar Rp 58.100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 53.032.586.238 atau sekitar 91.28% pada TA 2023. Dari realisasi tersebut, masih terdapat sekitar Rp 5.067.413.762 atau 8.72% sisa anggaran yang belum diserap.

Namun apabila dibandingkan dengan karakteristik indikator kinerja yang berupa *outcome*, maka performa realisasi anggaran tersebut tidak menggambarkan secara langsung korelasi antara realisasi anggaran dan pencapaian kinerja.

Faktor Pendukung

- Dukungan pengelola beasiswa baik internal maupun eksternal (mitra perguruan tinggi) serta koordinasi rutin dan berkala dalam memantau *progress* studi penerima beasiswa.
- Proses monitoring berkala untuk mengantisipasi penerima beasiswa yang terdeteksi awal belum dapat menyelesaikan studi sesuai masa studi normal baik dengan mitra perguruan tinggi maupun penerima beasiswa.

Faktor Penghambat/Kendala	Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala
<ul style="list-style-type: none"> • Penerima beasiswa dipanggil kembali bekerja ke instansi asal sebelum masa tugas belajar berakhir atau mendapat delegasi tugas di tengah proses studi. • Penerima beasiswa belum menyadari kewajiban persyaratan publikasi jurnal sebagai syarat kelulusan • Penerima beasiswa tidak berhasil memenuhi persyaratan kelulusan karena Karya ilmiah penerima beasiswa belum diterima oleh jurnal tertentu yang menjadi persyaratan kelulusan masing-masing perguruan tinggi. • Hambatan yang dirasakan mahasiswa dalam melakukan penelitian di lapangan, melakukan konsultasi dan mengatur waktu dengan kegiatan perkuliahan lainnya. • Persyaratan minimal terbitnya <i>prosiding</i> dan/atau jurnal internasional sebagai prasyarat Sidang/Ujian Akhir pada kampus tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian komponen pembiayaan tambahan untuk penerima beasiswa <i>on going</i> mulai tahun 2022 yaitu biaya publikasi ilmiah yang diberikan dengan <i>reimburse</i> dengan syarat, ketentuan dan batasan nominal. • Monitoring secara berkala melalui <i>sharing session</i> dan monitoring laporan perkembangan studi dan Diskusi rutin dengan Perguruan Tinggi yang bersangkutan terkait persyaratan jurnal dan hal-hal lainnya. • Monitoring secara berkala melalui laporan tahunan dari Perguruan Tinggi, Memiliki wadah komunikasi dengan Perguruan Tinggi maupun dengan mahasiswa, dan Monitoring secara berkala melalui <i>sharing session</i>. • Program studi dapat membuat <i>timeline</i> kelulusan tepat waktu sebagai acuan para penerima beasiswa dalam menyesuaikan target yang harus dilalui setiap semester. • Diharapkan prodi dapat menyosialisasikan kepada penerima beasiswa bagaimana mengakses referensi/buku literasi mengingat masih sulitnya mendapatkan literasi yang dibutuhkan dari situs <i>online</i> maupun buku lainnya. • Program studi diharapkan dapat menjembatani kesulitan yang dihadapi mahasiswa dan dosen pembimbing. • Mengakomodir sesi pelatihan penulisan karya tulis ilmiah bagi mahasiswa penerima beasiswa. • Memberikan informasi mengenai jurnal Kemenkominfo berstatus Sinta 2 yang masih dikelola BPSDM.

Rekomendasi

1. Himbauan untuk mitra pengelola Program Beasiswa atau pihak Perguruan Tinggi untuk kiranya dapat membuat langkah pencegahan di antaranya berupa pemberian izin atau rekomendasi perubahan metode penelitian atau media pengumpulan data.
2. *Friendly* reminder pada awal masa studi kepada penerima beasiswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa sekaligus penerima beasiswa termasuk kewajiban publikasi karya tulis ilmiah sehingga mahasiswa dapat bersiap lebih awal. Selain itu, menginformasikan kepada penerima beasiswa mengenai jurnal BPSDM Kominfo yang masih dikelola dan berstatus Sinta 2 untuk menambah pilihan mahasiswa mengirimkan jurnal ilmiah sebagai prasyarat kelulusan bagi prodi yang mensyaratkan status jurnal minimal Sinta 2.
3. Pemberian *workshop* penulisan karya tulis ilmiah untuk membantu mahasiswa yang akan menulis tugas akhir.
4. Untuk memperkaya literasi sekaligus peningkatan kompetensi digital, para penerima beasiswa dapat diarahkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dari program *Digital Talent Scholarship* (DTS) sesuai minat maupun kebutuhan instansi.

IKSP 1.4. Persentase (%) Penyelesaian Pembangunan Prasarana Sekolah Tinggi Multi Media

SP 1 MENINGKATNYA KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN SDM NASIONAL BIDANG TIK				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	% Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Persentase (%) Penyelesaian Pembangunan Prasarana Sekolah Tinggi Multi Media	50%	38,77%	77,54%
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Detail Engineering Design (10%) 2. Lelang Manajemen Konstruksi (10%) 3. Pekerjaan Konstruksi (30%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Detail Engineering Design (10%) 2. Lelang Manajemen Konstruksi (10%) 3. Pekerjaan Konstruksi (18,77% terdiri atas 5% tender konstruksi dan 13,77% pekerjaan konstruksi) 	

Tabel 3.17 IKSP 1.5. Persentase (%) Penyelesaian Pembangunan Prasarana Sekolah Tinggi Multi Media

Tantangan pengembangan pendidikan tinggi dimasa mendatang yang semakin ketat sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi. Tuntutan terhadap kualitas pendidikan di Era Digital lebih kompetitif mengharuskan lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi menjadi lebih berkualitas dan memiliki kompetensi digital sejalan dengan revolusi *industry* 4.0 sehingga dapat melahirkan SDM yang bertalenta digital. Sebagai penghasil tenaga berkualitas dan memiliki kompetensi digital era 4.0 penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mampu menjadi pendorong dan motivator pembangunan kawasan dan regional. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan peningkatan kualitas SDM pelayanan pendidikan dan sarana prasarana penunjang Pendidikan Tinggi. Lahirnya SDM dengan talenta digital dapat berperan dalam menghadapi perkembangan

teknologi digital. Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang bertalenta digital, Perguruan Tinggi perlu melakukan perubahan terhadap kurikulum, program studi, dan karakter serta kompetensi dosen. Hal tersebut juga dalam rangka mempercepat transformasi digital di Indonesia. STMM sebagai salah satu Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) wajib mengambil bagian dalam rangka melahirkan SDM bertalenta digital tersebut. Agar STMM dapat mensuplai kebutuhan talenta digital maka perlu dilakukan pengembangan pada STMM dengan mengembangkan kluster pendidikan STMM. Oleh karena itu, diperlukan perubahan model kepemimpinan, penataan organisasi, penataan program studi dan kurikulum, serta pengembangan level pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi seperti halnya program pascasarjana.

Pengembangan kelembagaan dan kependidikan STMM diperlukan agar mampu berperan menjadi Perguruan Tinggi andal yang setara *World Class University*. Pengembangan program studi dan jurusan yang ada di STMM saat ini dilakukan dengan penyesuaian tugas dan fungsi Kementerian Kominfo sebagai kementerian yang bertanggungjawab di bidang transformasi digital nasional. Struktur organisasi harus disesuaikan dengan ORTA Perguruan Tinggi modern. STMM harus dikelola oleh tenaga fungsional, profesional, dan terbuka untuk rekrutmen di luar struktural, mengingat SDM profesional tidak dapat disekat oleh iklim eselonisasi.

Dalam rangka mempersiapkan pengembangan kelembagaan dan kependidikan STMM, maka perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi penambahan peserta didik. Dari sisi penyediaan fasilitas Gedung Kantor dan Sarana Gedung Perkuliahan yang dimiliki STMM saat ini masih belum optimal sehingga perlu dilakukan pembangunan gedung sehingga menciptakan ruangan gedung kuliah yang memadai bagi dosen dan mahasiswa seiring dengan bertambahnya peserta didik, rencana penambahan program studi maupun jurusan baru yang sesuai dengan tuntutan era Digital.

Seiring dengan tujuan STMM menjadi pusat keunggulan digital (*center of excellence*) untuk mendukung program Transformasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka perlu

dilakukan pengembangan Pendidikan dengan membuka program studi baru dan atau pusat-pusat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan industri digital masa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan *branding* STMM sebagai kampus digital dengan salah satu cara memiliki gedung pendidikan yang menjadi cerminan transformasi digital.

Gedung Transformasi Digital nantinya tidak hanya dimanfaatkan oleh mahasiswa STMM namun juga dapat digunakan sebagai pusat pelatihan digital bagi seluruh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya dan pegawai di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika pada umumnya.

Pembangunan gedung pendidikan berupa Gedung transformasi digital untuk mendukung pengembangan kelembagaan STMM dengan lingkup pekerjaan berupa Pembangunan gedung transformasi digital dengan luas 8.496 m² (belum termasuk fasilitas umum) setinggi 4 (empat) dan 6 (enam) lantai dengan bangunan penghubung dalam rangka pengembangan Gedung Talenta Digital STMM yang meliputi kegiatan pengadaan konsultan perancang bangunan, konsultan manajemen konstruksi, dan pengadaan kontraktor pekerjaan konstruksi dengan metode pembangunan secara konvensional yang memiliki beberapa fungsi ruangan Gedung Transformasi Digital STMM akan dimanfaatkan sebagai berikut :

- a. Ruang untuk seminar skala Nasional dan Internasional;
 - b. Untuk ruang pertemuan dengan mitra Industri;
 - c. Ruang Inkubator Mahasiswa;
 - d. Ruang Perpustakaan;
 - e. Ruang perkuliahan Sarjana Terapan dan Magister Terapan;
 - f. Ruang Pamer Karya Mahasiswa;
 - g. Ruang Perkantoran dan Administrasi Pendidikan; dan
 - h. Ruang tunggu Tamu.
- d. *Multi-channel Network Agency*, yaitu tempat untuk melakukan aktivitas *co-creation* dalam mengembangkan budaya kolaboratif mahasiswa;
 - e. Studio konten, uji-coba, produksi dan pasca produksi untuk karya-karya mahasiswa; dan
 - f. Sudut kolaborasi, yaitu tempat untuk melaksanakan berbagai aktivitas lain terkait pengembangan pendidikan seperti loka karya, FGD, wawancara, atau rapat dan juga tempat kerja bersama (*co-working space*).

Untuk meningkatkan *skill* digital mahasiswa STMM maka di dalam Gedung transformasi digital juga akan dibangun sebuah digital hub yang Ruangan terbuka untuk menciptakan kolaborasi untuk mendukung pembelajaran dengan modalitas *project base* dalam memanfaatkan teknologi terkini, membuat prototipe inovatif dan membahas studi kasus. *Digital Hub* terdiri dari enam bagian utama yaitu :

- a. *Maker studio*, yaitu tempat untuk melaksanakan proses perubahan konsep menjadi prototipe dengan pemanfaatan perangkat lunak. Pada bagian ini merupakan tempat berkreasi dan bereksplorasi bagi mahasiswa;
- b. *Rumble*, yaitu tempat untuk berdiskusi dengan fasilitas layar lebar *touchscreen*;
- c. *Applied Intelligence Innovation Center*, yaitu tempat untuk mengeksplorasi aplikasi *advance analytics*, *artificial intelligence*, dan *machine learning*;

Pelaksanaan pembangunan gedung transformasi digital dilaksanakan dengan tender konstruksi bangunan sesuai dengan peraturan-peraturan terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara *multi years contract* (kontrak tahun jamak) dimulai dari tahun 2023 sampai dengan selesai di 2024 berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 196/M.KOMINFO/KU.01.01/04/2023 tanggal 11 April 2023. Konstruksi rencana akan dilaksanakan menggunakan metode konstruksi konvensional yang meliputi pekerjaan pengadaan konsultan perancang bangunan, konsultan manajemen konstruksi, dan pengadaan kontraktor konstruksi bangunan.

Tahapan yang dilaksanakan di Tahun 2023 :

1. Perencanaan *site plan dan basic design* bangunan;
2. Pengadaan Konsultan Perancang Bangunan dengan metode Seleksi;

3. Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dengan metode seleksi;
4. Review DED Bangunan hasil konsultan perancang Bangunan;
5. Pengajuan perijinan bangunan; dan
6. Pelaksanaan tender kontraktor konstruksi bangunan dengan metode konvensional.

Gedung Transformasi Digital akan difungsikan sebagai:

- a. Ruang perkuliahan baik Sarjana dan Paska Sarjana Terapan;
- b. Ruang kolaborasi STMM dengan Industri/Instansi lain untuk meningkatkan branding STMM;
- c. Ruang khusus kunjungan Menteri dan Ruang Rapat Pimpinan;
- d. Ruang untuk pelatihan talenta digital bekerja sama dengan Balai-Balai di bawah BPSDM Kominfo Kominfo;
- e. Ruang untuk pembinaan PTN/PTS Vokasi di bidang digital;
- f. Ruang Laboratorium Digital; dan
- g. Ruang Studio Digital Penyiaran dan Animasi.

Pembangunan Gedung Transformasi Digital secara Kontrak Tahun Jamak dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Menteri Kominfo Nomor 196/M.KOMINFO/ KU.01.01/04 2023 yang ditanda tangani pada tanggal 11 April 2023. Pekerjaan dimulai dengan pelaksanaan proses Seleksi Konsultan Perancang dan Konsultan Manajemen Konstruksi yang diumumkan melalui LPSE pada tanggal 14 Maret 2023 (Seleksi

Konsultan Perancang) dan 15 Maret 2023 (Seleksi Konsultan Manajemen Konstruksi). Berdasarkan proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim POKJA yang dibentuk UKPBJ Kementerian Kominfo maka diumumkan pemenang pada tanggal 9 Mei 2023 untuk seleksi Konsultan Perancang (*Detail Engineering Design/DED*) dan Konsultan Manajemen Konstruksi.

Berdasarkan kontrak dengan PPK, konsultan perancang bangunan wajib menyelesaikan rancangan bangunan selama 4 bulan dengan batas waktu pekerjaan rancangan bangunan sampai dengan tanggal 15 September 2023. Pekerjaan rancangan bangunan berupa rancangan detail DD, DED, RKS dan RAB dapat diselesaikan tepat waktu oleh konsultan untuk kemudian dilaksanakan *review* atas hasil pekerjaan rancangan bangunan oleh PPK dibantu Konsultan Manajemen Konstruksi. Maka, di tahap ini telah berhasil memenuhi target PK sebesar 20% dengan tersedianya *Detail Engineering Design* (10%) dan Lelang Manajemen Konstruksi (10%).

Setelah melalui *review* oleh PPK, Konsultan Manajemen Konstruksi, dan Tim Teknis maka PPK mengajukan permohonan pelaksanaan Tender Konstruksi Bangunan Kepada UKPBJ yang ditindaklanjuti UKPBJ Kementerian Kominfo dengan membentuk Tim POKJA untuk pelaksanaan tender Konstruksi Gedung Transformasi Digital.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Setelah melalui *review* dokumen pemilihan oleh Tim POKJA UKPBJ Kominfo, selanjutnya tender konstruksi diumumkan melalui LPSE pada tanggal 23 Oktober 2023. Setelah dilakukan proses tender maka didapatkan Pemenenag Penyedia Konstruksi Gedung Transformasi Digital. Setelah melalui masa sanggah maka penyedia resmi berkontrak dengan PPK pada tanggal 23 November 2023.

Sampai dengan akhir Desember, vendor telah melaksanakan konstruksi fisik dengan persentase sebesar 18,77% terdiri atas 13,77% pekerjaan konstruksi dan termasuk juga di dalamnya proses lelang dengan bobot 5%. Secara fisik pekerjaan struktur lantai satu telah selesai dikerjakan pada akhir Desember 2023.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

$$\frac{\Sigma \text{Total Pembangunan} = 38,77\%}{\Sigma \text{Target Pembangunan} = 50\%} \times 100\% = 77,54\%$$

Secara akumulasi tahunan, realisasi kinerja yang telah berhasil diselesaikan STMM Yogyakarta adalah:

- *Detail Engineering Design* (10%)
- lelang Manajemen Konstruksi (10%), dan
- Pekerjaan Konstruksi dengan bobot 18,77% yang terdiri atas 5% tender konstruksi dan 13,77% pekerjaan konstruksi.

Maka capaian Indikator ini sebesar 38,77% dari target 50% di tahun 2023. Dengan kata lain, persentase capaian Indikator ini adalah 77,54%.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

IKSP ini memiliki pagu sebesar Rp 40.780.127.000. Secara akumulasi, realisasi anggaran yang dapat diserap adalah sebesar Rp 30.910.879.419 atau sekitar 75.80% dari total anggaran. Sisa anggaran IKSP ini adalah sebesar Rp 9.869.247.581 atau sekitar 24.20%.

Faktor Pendukung

Realisasi *progress* masih berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Faktor Penghambat/Kendala

- Jika dilaksanakan dengan dengan metode *design and build* (BD) maka akan memerlukan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Dikhawatirkan apabila menggunakan metode tersebut maka proses yang harus dilalui menjadi lebih panjang. Durasi proses tersebut tidak dapat diprediksi maupun dikalkulasi secara akurat dan berisiko menghambat tahapan selanjutnya.
- Proses pembangunan tidak dapat menunggu perizinan bangunan rampung, sehingga STMM menyiasatinya dengan mengajukan proses perizinan bangunan secara *parallel*.

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Pengajuan Usulan Metode pembangunan dengan metode konvensional secara Kontrak Tahun Jamak (KTJ).
- Meskipun ketika membangun Gedung PBG/IMB belum keluar, untuk menghindari keterlambatan proses pembangunan selanjutnya, maka dapat memberikan *evidence* berupa perizinan yang tengah diajukan.
- Mengurus perizinan dan koordinasi teknis secara paralel dengan *stakeholder* terkait seperti Dinas PU, LKPP, Kementerian PUPR, Kajati DIY, POLDA DIY, pakar hukum, dan Ahli Bangunan UGM).

IKSP 1.5. Persentase (%) Realisasi Target PNBP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika

SP 1 MENINGKATNYA KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN SDM NASIONAL BIDANG TIK				
NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2023	Realisasi 2023	% Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Persentase (%) Realisasi Target PNBP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika	100% (Rp. 20.309.000.000)	108,90% (Rp 22.115.791.000)	108,90%

Tabel 3.18 IKSP 1.5. Persentase (%) Realisasi Target PNBP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.²² Terdapat 3 satuan kerja/UPT yang memiliki mekanisme penerimaan PNBP di lingkungan BPSDM Kominfo, yaitu STMM Yogyakarta, Pusdiklat dan BPPTIK Cikarang.

Berdasarkan amanat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika,²³ jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kominfo khususnya di lingkungan BPSDM Kominfo, meliputi penerimaan yang berasal dari penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (di Pusdiklat dan BPPTIK), penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media (di STMM) dan penggunaan sarana dan prasarana (Pusdiklat dan BPPTIK).

Pada tahun anggaran 2023, penerimaan PNBP dari ketiga satker/UPT tersebut berasal dari:

²² Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245.

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749

STMM	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Pendidikan: <i>Her registrasi</i> (registrasi ulang), Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA) mahasiswa baru, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tetap, dan SPP <i>variable</i> • Biaya pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) • Biaya Wisuda
Pusdiklat	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan
BPPTIK	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi • Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan

Tabel 3.19 Sumber Pendapatan PNBPN di Lingkungan BPSDM Kominfo

Dari sumber pemasukan PNBPN di atas, berikut realisasi PNBPN dari ketiga satker/UPT tersebut:

	Target	Realisasi	%
Pusdiklat	Rp 1.525.000.000	Rp 1.707.005.000	7,72%
STMM	Rp 18.000.000.000	Rp 19.615.825.000	88,70%
BPPTIK	Rp 784.000.000	Rp 792.961.000	3,59%
TOTAL	Rp. 20.309.000.000	Rp 22.115.791.000	108,90%

Tabel 3.20 Penerimaan PNBPN di Lingkungan BPSDM Kominfo

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

$$\frac{\sum \% \text{ Realisasi Penerimaan PNBPN Tahun 2023} = 108,9\%}{\sum \text{ Target Penerimaan PNBPN Tahun 2023} = 100\%} \times 100\% = 108,9\%$$

Faktor Pendukung

- Penerimaan CPNS dengan formasi Pranata Humas di beberapa K/L/Pemda.
- Peralihan dari jabatan struktural menjadi Jabatan Fungsional Tertentu sehingga memperbanyak peminat diklat JFT baik internal maupun eksternal.
- Kewajiban PNS mengikuti diklat dalam kurun waktu 1 tahun yakni minimal 20 JP sehingga kebutuhan tersebut perlu dipenuhi secara individual dan menjadi keuntungan tersendiri bagi satker/UPT penyelenggara diklat.

Faktor Penghambat/Kendala	Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Kurikulum dan modul yang masih mengadaptasi metode pelatihan offline.</u> - <u>Tidak dinamisnya jenis pelatihan di lingkungan BPPTIK dan Pusdiklat yang diizinkan untuk dilaksanakan dengan mekanisme penerimaan PNBP sehingga kurang dapat mengikuti tren kebutuhan pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Pelatihan dialihkan ke metode online</u> - <u>Pemasukan PNBP didapat dari Pendidikan dan/atau pelatihan secara daring.</u> - <u>Koordinasi dengan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik untuk merevisi kurikulum Pranata humas.</u> - <u>Melakukan diseminasi yang lebih masif untuk pelatihan teknis PNBP lainnya.</u> - <u>Mengusulkan revisi peraturan tentang jenis dan tarif PNBP di lingkungan BPSDM Kominfo (bersamaan dengan unit kerja lain di Kementerian Kominfo). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang baru ditetapkan pada 7 Desember 2021 maka tarif dan pengenaan PNBP atas diklat daring telah secara resmi ditetapkan sehingga diharapkan mampu mendongkrak PNBP di lingkungan BPSDM Kominfo pada tahun anggaran 2023 tergantung tanggal diundangkan dan mulai berlakunya PP tersebut. Apabila PP PNBP baru berlaku di akhir tahun maka tidak akan berpengaruh signifikan pada pelaksanaan di tahun 2023.</u>

Tabel 3.21 Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

SP.2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Sasaran tersebut dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut :

IKSP 2.1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan SDM Tahun 2023

SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien					
	Indikator	Target	Capaian	%	
1.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan SDM Tahun 2023	79.03 (skala 1-100)	91	115,	15%

Tabel 3.22 IKSP 2.1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan SDM Tahun 2023

Terdapat perbedaan signifikan pada penilaian RB tahun ini. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto menyatakan bahwa sebagaimana arah kebijakan RB Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik.



ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (RB)



Secara umum pelaksanaan RB General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Sementara tingkatan Instansional disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro. Strategi level makro diarahkan kepada dua hal, yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah. Strategi pada level meso dilaksanakan untuk memastikan berbagai arahan kebijakan RB level makro yang ditetapkan

oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan utama yang efektif mencapai tujuan dan sasaran strategis RB.

Kementerian PANRB juga telah menyusun sembilan kebijakan birokrasi digital sebagai strategi utama. Kebijakan tersebut, yaitu Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile*; Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional; Percepatan Transformasi *Squad* Model; Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan *SuperApps* Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi; Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN; Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui SAKP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah); Pembangunan MPP dan MPP Digital Services; Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*; serta Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligence*.

Pada penajaman *road map* juga diatur penyederhanaan indikator-indikator reformasi birokrasi. Penyederhanaan, integrasi, dan harmonisasi berbagai indikator RB dilakukan untuk menciptakan alat ukur yang konsisten, sederhana, namun fokus mengukur dampak. Lewat penyederhanaan indikator, instansi pemerintah tidak lagi disibukkan untuk mengisi dan menyiapkan data dukung untuk ribuan pertanyaan terkait RB. Harapannya instansi pemerintah bisa mengerahkan energinya untuk melaksanakan *reform* yang lebih substantif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.²⁴

²⁴<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berkenalan-dengan-konsep-reformasi-birokrasi-general-dan-reformasi-birokrasi-tematik>

Dari ketentuan RB Tematik di atas, BPSDM Kominfo terlibat dalam tema pengentasan kemiskinan dengan Sasaran Tematik, "Meningkatnya kompetensi dan kemampuan SDM Nasional Bidang TIK" dan Indicator:

- ✓ Jumlah peserta Pelatihan *digital skill* 1. SDM Umum (termasuk kawasan Prioritas) 2. SKKNI 3. ASN.
- ✓ Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TIK, Fungsional dan Manajerial.
- ✓ Jumlah peserta pelatihan TIK bagi Masyarakat (anak usia sekolah, perempuan, disabilitas).
- ✓ Jumlah Program Beasiswa.

Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan RB Tematik dilaksanakan oleh Inspektur III. Tujuan evaluasi untuk memastikan *Road Map* dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan BPSDM Kominfo.

Evaluasi internal dilakukan atas dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi pelaksanaan. Dalam melakukan evaluasi perencanaan, evaluator internal menelaah dokumen perencanaan RB untuk mendapat informasi mengenai kesesuaian sasaran, indikator, dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* RB. Sedangkan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan, evaluator internal menelaah pelaksanaan rencana aksi untuk mendapat informasi mengenai ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan,

ketercapaian output kegiatan, kualitas pelaksanaan kegiatan, dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi internal RB di lingkungan BPSDM Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Umum

Dalam implementasi RB di lingkungan Kementerian Kominfo, BPSDM Kominfo merupakan Unit Eselon I yang mendukung pencapaian sasaran RB Tematik Penurunan Angka Kemiskinan melalui program *Digital Talent Scholarship* (DTS), teknis TIK fungsional dan manajerial, teknis TIK masyarakat, dan beasiswa Kominfo yang memiliki sasaran peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM Nasional bidang TIK.

Berdasarkan hasil capaian realisasi sasaran RB Tematik di BPSDM Kominfo hingga periode triwulan III, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. DTS telah mencapai 89.269 peserta dari target 50.000 peserta (178,53%);
- b. Pelatihan teknis TIK fungsional dan manajerial mencapai 2.765 peserta dari target 2.780 peserta (99,46%);
- c. Pelatihan teknis TIK masyarakat telah mencapai 1.209 peserta dari 1.000 peserta (121%);
- d. Beasiswa mencapai 206 penerima dari target 300 penerima beasiswa (68,66%).

2. Catatan Perencanaan dan Pelaksanaan RB di BPSDM Kominfo

- a. Atas perencanaan RB
 - 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pasal 3 menyatakan bahwa

strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan pendapatan Masyarakat miskin dan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMK, serta pasal 5 menyatakan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari kelompok berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program pelatihan BPSDM mendukung sasaran RB Tematik Penurunan Angka Kemiskinan.

2) *Cascading indikator* yang digunakan dalam dokumen *road map* RB belum selaras dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kominfo Tahun 2020 sd 2024 dan Rencana Kerja (Renja) BPSDM Kominfo Tahun 2023 serta indikator dalam *road map* RB belum relevan dengan sasarannya.

b Atas pelaksanaan RB

Catatan yang perlu mendapat perhatian pada kualitas pelaksanaan aksi (manajemen/pengelolaan kegiatan):

1) Terdapat *drop rate* peserta yang cukup tinggi pada kegiatan pelatihan untuk ASN (GTA, DLA, dan Teknis TIK Fungsional dan Manajerial) yang menggunakan metode *online* dengan skema pelatihan yang memiliki jumlah Jam Pelatihan (JP) cukup panjang. Tingginya *drop rate* tersebut disebabkan peserta selaku ASN

yang memperoleh penugasan lain dari pimpinannya ketika sedang mengikuti pelatihan. Hal ini mengakibatkan penyampaian materi pelatihan tidak dapat berjalan secara efektif, serta kewajiban jumlah JP kehadiran peserta tidak terpenuhi.

2) Pelaksanaan pelatihan dengan metode swakelola belum sesuai dengan ketentuan PBJ. Hal ini terkait dengan tidak adanya Tim Pengawas dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini mengakibatkan persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi dapat tidak sesuai dengan perencanaannya.

3) Persentase (%) orang yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu hingga triwulan III memiliki capaian sebesar 72,73% dari target 90% (108 dari 165 orang). Hal tersebut disebabkan:

a. kelulusan mahasiswa mengikuti kalender akademik perguruan tinggi terkait (satu tahun memiliki dua semester) yang mengakibatkan pelaporan capaian menumpuk di triwulan IV;

b. terdapat penerima beasiswa yang belum memahami pemenuhan persyaratan kelulusan dan publikasi jurnal ilmiah yang mengakibatkan penerima beasiswa terkendala untuk lulus tepat waktu.

Prosentase capaian IKSP ini adalah 115,15% dengan membandingkan dari target awal IKSP ini yakni 79,3. Maka, capaian IKSP melebihi target yang semula ditetapkan dengan prosentase capaian sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Nilai RB Badan Litbang SDM Tahun 2023} = 91}{\sum \text{Target Nilai RB Badan Litbang SDM Tahun 2023} = 79,3} \times 100\% = 115,15\%$$

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya, IKSP ini memiliki pagu sebesar Rp 23.077.819.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.075.251.701 atau sekitar 95.66%. Dari realisasi tersebut, masih terdapat sekitar Rp 1.002.567.299 atau 4.34% sisa anggaran yang tidak terserap.

Namun apabila dibandingkan dengan karakteristik indikator kinerja yang berupa *outcome*, maka performa realisasi anggaran tersebut tidak menggambarkan secara langsung korelasi antara realisasi anggaran dan pencapaian kinerja.

Faktor Penghambat/Kendala

Perubahan indikator penilaian RB memerlukan proses sosialisasi dan pemahaman lebih dalam karena sangat berbeda dengan indikator penilaian RB pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan kondisi RB Tematik yang merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 dan hanya memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024, menjadikan proses penilaian RB tahun ini sesuatu yang baru bagi instansi maupun

unit kerja teknis. Sehingga, instansi maupun unit kerja perlu mempelajari dan mengidentifikasi kembali *variable* sesuai komponen penilaian.

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Mempersiapkan penilaian RB Tematik melalui pelaksanaan rapat Koordinasi Reformasi birokrasi BPSDM Kominfo 2023 dan pembentukan tim RB unit kerja di Triwulan I. Selanjutnya, pada Triwulan II mulai dilakukan identifikasi tema RB apa yang sesuai dengan program yang dilaksanakan BPSDM Kominfo dan melakukan monitoring serta evaluasi berkala tiap Triwulan untuk mengidentifikasi capaian per indikator kegiatan.

Rekomendasi

Dari laporan evaluator internal, berikut rekomendasi yang dapat dilaporkan:

a. Atas perencanaan RB

BPSDM Kominfo agar berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Biro Perencanaan untuk melakukan analisis keselarasan *cascading* indikator dari Renstra Kemkominfo dan Renja BPSDM Kominfo ke dalam *Road Map* RB Kemkominfo serta keterkaitannya dengan sasaran.

b. Atas pelaksanaan RB

1. BPSDM Kominfo agar berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Biro Perencanaan untuk melakukan analisis keselarasan *cascading* indikator dari Renstra Kemkominfo dan Renja BPSDM Kominfo ke dalam *Road Map* RB Kemkominfo serta keterkaitannya dengan sasaran.

2. BPSDM Kominfo agar membentuk Tim Pengawas bagi pelaksanaan pelatihan yang menggunakan metode swakelola untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi.
3. BPSDM Kominfo agar menyusun rencana dan melaksanakan sosialisasi atau bimbingan mengenai persyaratan kelulusan dan publikasi jurnal ilmiah kepada penerima beasiswa.

IKSP 2.2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1)

SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien						
	Indikator	Target	Capaian	%		
2.	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1)	80	90	112,5	%	

Tabel 3.23 IKSP 2.2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1)

Dalam rangka memberikan gambaran tentang kualitas pelaporan keuangan pada tingkat Eselon 1 selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1

(UAPPA E1), berdasarkan hasil *benchmark* terhadap dokumen Perjanjian Kinerja K/L lainnya dan *exercise* rumusan nomenklatur indikator kinerja turunnya (*cascading*), sejak 2023 indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1) masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo pada Sasaran Program 2, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

Nilai kualitas pelaporan keuangan pada level Eselon 1 diukur berdasarkan 2 komponen penilaian, yaitu:

- Komponen penilaian “Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK” yang diperoleh dari uraian pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan.
- Komponen penilaian “Rata-rata nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran” yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata nilai laporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Prosentase capaian IKSP ini adalah 112,5% dengan membandingkan dari target awal IKSP ini yakni 80. Maka, capaian IKSP melebihi target yang semula ditetapkan dengan prosentase capaian sebagai berikut:

No	Indikator Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I	Metode Penilaian				BPSDM	
		Bobot	Faktor Pengurangan	Persentase Pengurangan	Nilai Pengurangan	Nilai Rata-rata Satker	Nilai Konversi
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x (2)	(5) = (4) x 100		
I	Indeks						100
II	Faktor Pengurangan:						-10
1.	Jumlah Temuan yang Mempengaruhi Opini BPK	50%					0
	1) Tidak ada temuan		0%	0%	0		0
	2) Jumlah temuan 1		-20%	-10%	-10		
	3) Jumlah temuan 2 s.d. 3		-30%	-15%	-15		
	4) Jumlah temuan lebih dari 3		-50%	-25%	-25		
2.	Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Eselon I/Kementerian	50%					-10
	1) Nilai 100		0%	0%	0		
	2) Nilai 90 - 99,99		-20%	-10%	-10	98,18	-10
	3) Nilai 80 - 89		-30%	-15%	-15		
	4) Nilai dibawah 80		-50%	-25%	-25		
III	Nilai Akhir (I) + (II)						90

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran BPSDM Kominfo pada awal tahun 2023 sebesar Rp 582.083.045.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun setelah dilakukan revisi, alokasi anggaran BPSDM Kominfo TA 2023 menjadi Rp 576.283.345.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp 554.723.399.272 (96.26%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 21.559.945.728.

Rincian Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Barang BPSDM Kominfo TA 2023 dapat dilihat pada matriks berikut:

Realisasi per Belanja (Rupiah Murni)

Realisasi (OMSPAN)	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Belanja Pegawai	Rp 76.469.127.000	Rp 75.765.357.836	Rp 703.769.164	99,08%
Belanja Barang	Rp 300.835.579.000	Rp 291.060.429.192	Rp 9.775.149.808	96,75%
Belanja Modal	Rp 179.743.599.000	Rp 169.269.284.322	Rp 10.474.314.678	94,17%
Total	Rp 557.048.305.000	Rp 536.095.071.350	Rp 20.953.233.650	96,24%

Realisasi per Belanja (PNBP)

Realisasi (OMSPAN)	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Belanja Barang	Rp 13.644.701.000	Rp 13.067.302.922	Rp 577.398.078	95,77%
Belanja Modal	Rp 5.590.339.000	Rp 5.561.025.000	Rp 29.314.000	99,48%
Total	Rp 19.235.040.000	Rp 18.628.327.922	Rp 606.712.078	96,85%

Realisasi Total (RM dan PNBP)

Realisasi per 14 Januari 2024 (OMSPAN)	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Belanja Pegawai	Rp 76.469.127.000	Rp 75.765.357.836	Rp 703.769.164	99,08%
Belanja Barang	Rp 314.480.280.000	Rp 304.127.732.114	Rp 10.352.547.886	96,71%
Belanja Modal	Rp 185.333.938.000	Rp 174.830.309.322	Rp 10.503.628.678	94,33%
Total	Rp 576.283.345.000	Rp 554.723.399.272	Rp 21.559.945.728	96,26%

Untuk dapat membandingkan performa dalam tahun anggaran Renstra dapat dilihat pada matriks kinerja anggaran BPSDM Kominfo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023:

KINERJA ANGGARAN BPSDM KOMINFO				
	2020	2021	2022	2023
Pagu Awal (Rp)	522.287.750.000	530.715.186.000	974.471.264.000	582.083.045.000
Pagu Revisi (Rp)	304.801.530.000	387.392.257.000	839.899.645.000	576.283.345.000
Realisasi (Rp)	271.407.492.196	369.428.851.127	789.611.956.792	554.723.399.272
Realisasi (%)	89,04%	95,36%	94,01%	96,26%

Tabel 3.24 Kinerja Anggaran BPSDM Kominfo Tahun 2020 s.d Tahun 2023

PENUTUP

BPSDM Kominfo telah melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika melalui program kerja Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis Kementerian Kominfo dan BPSDM Kominfo Tahun 2020–2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja BPSDM Kominfo Tahun 2023.

Secara keseluruhan BPSDM Kominfo telah menghasilkan kinerja yang maksimal dan optimal. Diskresi pimpinan yang adaptif membuat seluruh jajaran BPSDM Kominfo mampu mengejar target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa di antaranya melampaui target. Berikut ikhtisar capaian kinerja BPSDM Kominfo Tahun Anggaran 2023, yang dapat kami sampaikan:

1. Dari 7 (tujuh) IKSP yang telah ditetapkan, sebanyak 5 (lima) IKSP atau sekitar 71,43% IKSP yang pencapaiannya melebihi target (>100%).
2. IKSP yang pencapaiannya melebihi target dari yang ditetapkan (>100%) adalah :
 - 1) Persentase (%) Peserta Pelatihan *Digital Skill* yang Kompeten;
 - 2) Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang Dinyatakan Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis TIK;
 - 3) Persentase (%) Realisasi Target PNB Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan SDM Tahun 2023; dan
 - 5) Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1).

Rekap performa masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program secara akumulasi sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET	REALISASI TW I 2023	REALISASI TW I 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	1. Persentase (%) Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> yang Kompeten (Eksisting Tahun 2022: 79,33% atau 192.659 Peserta tersertifikasi dari total peserta pelatihan <i>Digital Skill</i> sebanyak 242.862 Peserta)	70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)	83,75% Peserta On Boarding: 106.551 Completion: 89.233	119,64%
		2. Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang Dinyatakan Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional, dan Teknis TIK (Eksisting 2020 s.d. 2022: 4.544 peserta)	90% (2.502 dari Total Target 2.780 ASN)	93,51% (3.486 peserta pelatihan ASN dinyatakan kompeten/lulus pelatihan dari 3.728 peserta ujian dengan total 3.728 peserta pelatihan.	103,9%
		3. Persentase (%) Orang yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/Digital yang Lulus Tepat Waktu (Eksisting Tahun 2022: 63,44% atau 85 peserta lulus dari 134 peserta)	90% (147 dari 165 orang)	77,58% (128 dari 165 orang)	86,20%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Pembangunan Prasarana Sekolah Tinggi Multi Media	50% 1. Tersedianya <i>Detail Engineering Design</i> (10%) 2. Lelang Manajemen Konstruksi (10%) 3. Pekerjaan Konstruksi (30%)	38,77% 1. Tersedianya <i>Detail Engineering Design</i> (10%) 2. Lelang Manajemen Konstruksi (10%) 3. Pekerjaan Konstruksi (18,7%)	77,54%
		5. Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika	100% (Rp. 20.309.000.000,-)	108,90% (Rp 22.115.791.000)	108,90%

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



BPSDM Kominfo perlu mengambil langkah perbaikan untuk meningkatkan performa kinerja, di antaranya melalui pematangan perencanaan program dan penyusunan anggaran dan kegiatan serta agenda kegiatan yang lebih optimal dan efisien disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala. Koordinasi yang lebih intensif dengan satuan kerja dan UPT di Kementerian Kominfo terutama dalam penyusunan kebijakan, pola pembinaan, pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis serta perubahan mindset dan etos kerja SDM di lingkungan BPSDM Kominfo sehingga koordinasi dengan pihak eksternal pun akan lebih optimal untuk pencapaian target yang telah ditetapkan. Identifikasi dan mitigasi risiko juga perlu diidentifikasi dan secara berkala dimonitoring melalui mekanisme Manajemen Risiko.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 444.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 445.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2021.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245

Dokumen Pendukung

Executive Summary Indeks Masyarakat Digital (IMDI). Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2022.

Laporan Tahunan Program Vocational School Graduate Academy Digital Talent Scholarship Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun 2023. 2023. Jakarta: Badan Pengembangan SDM Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Manual Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun 2023. 2023. Jakarta: Badan Pengembangan SDM Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rencana Strategis BPSDM Kominfo Tahun 2020-2024. 2023. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan SDM.

Internet

<https://www.antaraneews.com/berita/3314226/pemerataan-indeks-masyarakat-digital-perlu-digiatkan-di-daerah>

"Jokowi Sebut APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan Utama, Apa Saja?", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211129/10/1471608/jokowi-sebut-apbn-2023-fokus-pada-6-kebijakan-utama-apa-saja>, diakses 30 Januari 2023

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berkenalan-dengan-konsep-reformasi-birokrasi-general-dan-reformasi-birokrasi-tematik>

<https://kumparan.com/kumparantech/skor-indeks-masyarakat-digital-37-8-dari-100-literasi-digital-ri-masih-rendah-lzTXxrvrAHO/4>

Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Kementerian P P N / B A P P E N A S . https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dit%20Evaluasi%20C%20dan%20Pengendalian%20Penyusunan%20Perencanaan%20Pembangunan/Ringkasan%20RKP%202023.pdf

Sarwohadi, Sandjaja. Arah Pembangunan Bidang Aparatur Negara dalam RPJMN 2020-2024 dan Rancangan Awal RKP 2023, disampaikan pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, https://bkd.jatengprov.go.id/assets/download/Arah_Pembangunan_Bid._Aparatur_Negara_dan_Ranwal_RKP_2023_final_-_BKD_Jateng.pdf

<https://kilaskementerian.kompas.com/ke-menkominfo/read/2023/12/22/10233171/lewat-digiers-day-kemenkominfo-hadirkan-terobosan-peningkatan-kompetensi>

https://lan.go.id/?page_id=1872
<https://www.antaraneews.com/berita/2887373/pemerintah-siapkan-sdm-digital-yang-unggul-dan-berdaya-saing>
https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sampaikan_lima_fokus_ra_pbn_2023

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Perjanjian Kinerja BPSDM Kominfo Tahun 2023

Lampiran 2.

SOP Verifikasi Data Peserta Digital Talent Scholarship

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**